

# Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH. Hasil Karya dan Pengabdianya

Oleh :

Drs. Mardanas Safwan



Direktorat  
Kebudayaan

8

58/1984

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

1983/1984

MILIK DEPARTEMEN P DAN K  
TIDAK DIPERDAGANGKAN

**Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH.**

**Hasil Karya dan Pengabdianya**

Oleh :  
**Drs. Mardanas Safwan**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
1983/1984

**Penyunting :**

1. **Drs. Anhar Gonggong.**
2. **Drs. M. Soenyata Kartadarmadja.**

**Gambar kulit oleh :**

**Iswar Ks.**

**SAMBUTAN**  
**DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku-buku biografi Tokoh dan Pahlawan Nasional. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan tertibnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1983  
Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio  
NIP. 130119123

## **KATA PENGANTAR**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain mengerjakan penulisan biografi Tokoh yang telah berjasa dalam masyarakat.

Adapun pengertian Tokoh dalam naskah ini ialah seseorang yang telah berjasa atau berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, keolahragaan dan seni budaya nasional di Indonesia.

Dasar pemikiran penulisan biografi Tokoh ini ialah, bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahir, melainkan juga mengejar kepuasan batin, dengan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Tujuan penulisan ini khususnya juga untuk merangsang dan membina pembangunan nasional budaya yang bertujuan menimbulkan perubahan yang membina serta meningkatkan mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila, dan membina serta memperkuat rasa harga diri kebanggaan nasional dan kepribadian bangsa.

Jakarta, Juni 1983

**Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi  
Sejarah Nasional**

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
PENDAHULUAN .....	iv
BAB I. RIWAYAT HIDUP IWA KUSUMA SUMANTRI .....	1
A. Dari Lingkungan Keluarga Sampai Kegiatan Awal Dalam Pergerakan .....	1
B. Menteri Sosial RI Pertama .....	8
BAB II. PERJUANGAN IWA KUSUMA SUMANTRI PADA ZAMAN PERGERAKAN NASIONAL .....	15
A. Perkumpulan Mahasiswa Indonesia Di Negeri Belanda .....	15
B. Menjadi Ketua Indonesische Vereeniging .....	23
BAB III. PERJUANGAN IWA KUSUMA SUMANTRI PADA ZAMAN KEMERDEKAAN.	39
A. Perjuangan Awal .....	39
B. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan .....	46
PENUTUP .....	67
DAFTAR BACAAN .....	70

## PENDAHULUAN

Iwa Kusuma Sumantri dilahirkan pada tanggal 31 Mei tahun 1899 di Ciamis Jawa Barat. Setelah menyelesaikan Sekolah Dasar, Iwa Kusuma Sumantri melanjutkan pelajarannya ke sekolah OSIVA, di Jakarta. Tidak lama bersekolah di OSIVA, karena ia kemudian pindah ke Sekolah Hukum (Recht School).

Pada tahun 1921 Iwa Kusuma Sumantri dapat menyelesaikan pelajarannya di Sekolah Hukum. Kemudian bekerja di kantor Pengadilan Negeri Bandung. Iwa Kusuma Sumantri akhirnya pindah bekerja di Surabaya dan sesudah itu pindah lagi ke Jakarta.

Pada tahun 1922 Iwa Kusuma Sumantri berangkat ke Negeri Belanda untuk melanjutkan pelajarannya, dengan biaya sendiri. Di samping menuntut pelajaran, ia juga aktif dalam gerakan mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, yaitu dalam organisasi *INDONESISCHE VERENIGING* yang kemudian menjadi „*Perhimpunan Indonesia*„ (PI).

Dari tahun 1923 sampai tahun 1924, Iwa Kusuma Sumantri dipilih menjadi Ketua *Indonesische Vereniging*. Di antara anggota pengurus lainnya dalam pengurusan pimpinan Iwa Kusuma Sumantri adalah Moh. Hatta yang menjabat sebagai bendahara.

Pada tahun 1925, Iwa Kusuma Sumantri dapat menyelesaikan pelajarannya dengan mencapai gelar *Meester in de Rechten (MR)*. Oleh pengurus PI, Iwa Kusuma Sumantri, kemudian ditugaskan ke Rusia. Setelah pemberontakan tahun 1926/1927, Iwa Kusuma Sumantri kembali ke tanah air lewat Negeri Belanda. Sesampai di Indonesia ia masuk menjadi anggota PNI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno.

Pada tahun 1929, Iwa Kusuma Sumantri ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda dan tahun 1930 ia dibuang ke Banda Neira. Sebelumnya juga telah dibuang ke tempat itu seorang pejuang lainnya yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Tahun 1935 Moh. Hatta dan Sutan Syahrir juga dipindahkan pembuangannya dari Digul ke Banda Neira.

Pada tahun 1941 tempat pembuangan Iwa Kusuma Sumantri dipindahkan dari Banda Neira ke Makassar. Zaman pendudukan Jepang Iwa Kusuma Sumantri berhasil kembali ke Jakarta, dan kemudian bekerja pada kantor riset *Kaigun* cabang Jakarta yang dipimpin oleh Achmad Subarjo.

Pada permulaan kemerdekaan Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi Menteri Sosial dalam kabinet pertama yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Ia kemudian mengadakan oposisi terhadap kabinet Syahrir, dan terlibat dalam "*Peristiwa 3 Juli*".

Pada tahun 1948 diberi grasi oleh Presiden, dan kemudian ikut berjuang bersama para pemuda di daerah Jawa Barat. Setelah itu masuk menjadi anggota Partai Murba.

Sesudah Pengakuan Kedaulatan, diangkat menjadi anggota IPR Pusat. Tahun 1953 diangkat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo. Tahun 1958 diangkat menjadi Presiden (Rektor) Universitas Pajajaran di Bandung.

Tahun 1961 diangkat menjadi Menteri PTIP dan tahun 1962 diangkat menjadi Menteri Negara oleh Presiden Sukarno. Tahun 1966 pensiun dari semua jabatan pemerintahan dan politik. Iwa Kusuma Sumantri mulai aktif menulis dan sampai saat terakhir menghasilkan 9 buah karya tulis.

Pada tanggal 27 Nopember 1971 Mr. Iwa Kusuma Sumantri meninggal dunia di Paviliun Cendrawasih RSCM Jakarta setelah dirawat beberapa waktu. Jenazahnya dimakam-



kan di pemakaman Karet dengan upacara kenegaraan dan Menteri Sosial HMS Mintareja sebagai Inspektur Upacara.

## BAB I

### RIWAYAT HIDUP IWA KUSUMA SUMANTRI

#### A. DARI LINGKUNGAN KELUARGA SAMPAI KEGIATAN AWAL DALAM PERGERAKAN

Iwa Kusuma Sumantri dilahirkan pada tanggal 31 Mei 1899 di Ciamis, Jawa Barat. Ia adalah putera sulung dari keluarga Wiramantri yang mempunyai 12 orang putra-putri. Sebagai anak yang tertua dari 12 orang bersaudara Iwa Kusuma Sumantri maka sejak kecilnya telah dihadapkan pada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya.

Pergaulan dengan keluarganya sangat akrab di mana Iwa Kusuma Sumantri sebagai anak yang tertua selalu bertanggung jawab kepada adik-adiknya. Terhadap teman-temannya Iwa Kusuma Sumantri selalu bersikap ramah. Dalam pergaulan ia tidak pernah membedakan antara anak orang kaya dan orang miskin, walaupun Iwa Kusuma Sumantri sendiri termasuk anak orang terpendang di daerahnya.<sup>1)</sup>

Pada tahun 1915 Iwa Kusuma Sumantri dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah OSVIA, tetapi sekolah ini tidak berkenan di hati Iwa Kusuma Sumantri. Ia menganggap sekolah itu terlalu ke barat-baratan, persaingan antara siswa tidak sehat dan pelaksanaan perpeloncoan sangat memuakkan. Menurut anggapan Iwa Kusuma Sumantri sekolah OSVIA itu hanya mempersiapkan orang-orang yang akan menjadi pegawai pemerintah jajahan.

Itulah sebabnya dalam tahun 1915 itu juga Iwa Kusuma Sumantri ke luar dari sekolah OSVIA. Kemudian Iwa Kusuma Sumantri masuk ke Sekolah Hukum (*Recht School*), karena bidang ini dianggap cocok dan sesuai dengan bakatnya. Pergaulan dengan kawan-kawannya semakin banyak dan luas karena

di samping menuntut pelajaran, Iwa Kusuma Sumantri mulai kenal dengan dunia pergerakan, tetapi pada saat ini ia belum terjun secara aktif.<sup>2)</sup>

Pada tahun 1921 Iwa Kusuma Sumantri dapat menyelesaikan pelajarannya di Sekolah Hukum dengan hasil memuaskan. Setelah menyelesaikan sekolahnya Iwa Kusuma Sumantri bekerja pada kantor Pengadilan Negeri di Bandung. Sebenarnya bekerja pada pemerintah Hindia Belanda bukan menjadi cita-cita dan keinginan Iwa Kusuma Sumantri, tetapi karena ingin menambah pengalamannya maka ia bekerja di tempat itu. Setelah bekerja di Bandung, kemudian Iwa Kusuma Sumantri pindah bekerja di Surabaya.

Di Surabaya Iwa Kusuma Sumantri bekerja pada Pengadilan Tinggi dengan harapan bahwa dengan jabatan ini ia mendapat kesempatan untuk belajar ke negeri Belanda. maka Iwa Kusuma Sumantri pindah lagi bekerja ke Jakarta.

Kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Iwa Kusuma Sumantri tidak kunjung datang juga. Karena tidak sabar menunggu ketetapan pemerintah Hindia Belanda yang birokratis itu, maka Iwa Kusuma Sumantri memutuskan untuk berangkat dengan biaya sendiri ke Negeri Belanda.<sup>3)</sup>

Pada bulan September 1922 Iwa Kusuma Sumantri berangkat ke negeri Belanda bersama dengan seorang temannya yang bernama Sartono. Selama menuntut pelajaran di Negeri Belanda, Iwa Kusuma Sumantri telah mulai terjun secara aktif dalam dunia pergerakan di samping menuntut pelajaran. Dari tahun 1923 - 1924 Iwa Kusuma Sumantri terpilih sebagai ketua *Indonesische Vereeniging* (Perkumpulan Hindia). Selama memimpin Perkumpulan Hindia, Iwa Kusuma Sumantri selalu berusaha agar perkumpulan itu betul-betul merupakan wadah bagi pergerakan mahasiswa Indonesia di luar negeri.<sup>4)</sup>

Nama Perkumpulan Hindia kemudian diganti dengan Perhimpunan Indonesia (PI). Tujuan PI adalah untuk mencapai Indonesia Merdeka dengan menyatukan berbagai golongan bangsa Indonesia untuk dapat mematahkan kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Dalam lapangan politik PI bekerja sama dengan partai-partai politik di Indonesia, dan partai-partai politik itu mengakui kepemimpinan PI sebagai pos terdepan (*Voorpost*) di Eropah.

PI mendukung azas demokrasi dan memajukan politik non koperasi dengan pemerintah Hindia Belanda. Pemimpin-pemimpin PI lainnya yang terkenal adalah : Moh. Hatta, Achmad Subarjo, Gatot Tanumiharja, Nasir Datuk Pamuncak, Moh. Nasif, Darmawan Mangunkusumo, dan Sukirman Wiryosanjoyo. Andil yang diberikan PI terhadap pergerakan nasional di Indonesia sangat besar sekali <sup>5)</sup>.

Terhadap lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 PI memberikan sumbangan yang besar, terutama dengan melalui majalah-majalah *Indonesia Merdeka*. Disamping mengikuti pergerakan kebangsaan di luar negeri dengan langsung memimpin PI, Iwa Kusuma Sumantri juga tidak mengabaikan pelajaran. Pada tahun 1925 Iwa Kusuma Sumantri dapat menyelesaikan pelajarannya dengan mencapai gelar *Meester in de Rechten* (MR).

Pada waktu itu pemimpin PI telah beralih ke tangan Moh. Hatta. Setelah menyelesaikan pelajarannya di Negeri Belanda Mr. Iwa Kusuma Sumantri diutus oleh pemimpin PI bersama-sama dengan Samaun ke Moskow. Mereka berdua ditugaskan untuk mempelajari program Front Persatuan yang sedang didengung-dengungkan ketika itu oleh Rusia dan sampai dimana peranan Rusia dalam program itu.<sup>6)</sup>

Selama melakukan tugas di Rusia, Mr. Iwa Kusuma Sumantri sebagai seorang pemuda terpikat kepada seorang gadis Rusia. Memang hubungan cinta itu tidak mengenal bangsa dan warna kulit, cinta adalah perpaduan hati antara dua makhluk manusia yang saling membutuhkan. Walaupun pada waktu itu Iwa Kusuma Sumantri telah terikat nikah gantung dengan seorang gadis Sunda dan juga tokoh pergerakan wanita yang bernama Ema Puradiraja, tetapi Iwa Kusuma Sumantri telah bulat tekad hatinya untuk menikah dengan gadis Rusia itu.

Gadis Rusia yang telah berhasil mendapatkan cinta dari Iwa Kusuma Sumantri itu bernama Anna Ivanova. Iwa Kusuma Sumantri selama di Rusia terkenal dengan nama Dengli. Anna dan Dengli kemudian menikah, dan selama pernikahan mereka dianugerahi seorang anak perempuan yang mereka beri nama Sumira Dengli. Hubungan antara Iwa dan Emma Puradiraja atas persetujuan mereka berdua terpaksa mereka putuskan, apalagi Iwa telah lama meninggalkan tanah air.<sup>7)</sup>

Selama di Rusia Mr. Iwa Kusuma Sumantri sempat menulis sebuah buku tentang petani-petani di Indonesia, dan judul buku itu adalah : „*The Peasant Movement in Indonesia*“.<sup>8)</sup> Walaupun telah mempunyai isteri dan anak di Rusia, Mr. Iwa Kusuma Sumantri sebagai seorang pemimpin Indonesia tidak dapat lama-lama bermukim di negeri orang.

Panggilan dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin mengharapkan ia kembali ke Indonesia. Sedianya Iwa Kusuma Sumantri bermaksud memboyong keluarganya ke Indonesia, tapi karena keluarganya tidak bersedia, maka akhirnya mereka berpisah dengan cara baik-baik. Selain dari panggilan tanah air kesehatan Iwa Kusuma Sumantri juga tidak mengizinkan terus menetap di Rusia. Udara tidak cocok untuk keadaan jantung Iwa Kusuma Sumantri.

Setelah pemberontakan pada tahun 1926 - 1927 Iwa Kusuma Sumantri pulang kembali ke tanah air lewat negeri Belanda dan selama beberapa bulan ia di negeri Belanda, lalu Iwa Kusuma Sumantri pulang kembali ke Indonesia. Pada waktu itu belum banyak golongan intelegensia di Indonesia, tetapi golongan yang terbatas ini pun sudah cukup memadai untuk menggerakkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Tidak heranlah kiranya apabila tokoh pergerakan seperti Mr. Iwa Kusuma Sumantri selalu diawasi setiap langkah kegiatannya oleh pemerintah Hindia Belanda. Tetapi sebaliknya kedatangan Iwa Kusuma Sumantri telah lama dinantikan oleh teman-teman seperjuangannya. Maka kedatangan Iwa Kusuma Sumantri disambut dengan tangan terbuka oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia.

Sesampai di Indonesia Mr. Iwa Kusuma Sumantri langsung masuk menjadi anggota PNI.<sup>9)</sup> PNI pada hakekatnya melanjutkan cita-cita PI yang telah didirikan oleh mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, di mana Iwa Kusuma Sumantri pernah menjadi ketuanya. Di bawah pimpinan Ir. Soekarno dan tokoh-tokoh militan yang berasal dari PI, maka PNI maju dengan pesat dan menjadi partai politik terkemuka pada saat itu di Indonesia.

Disamping itu Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga bekerja sebagai pengacara bersama-sama dengan Mr. Sartono di Jakarta. Selain dari itu Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga bertindak mewakili kantor pengacara Mr. Iskaq Tjokroadisurjo yang berpusat di Bandung. Tetapi karena Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang tidak menyukai kebebasannya dibatasi, maka ia tidak kerasan terikat bekerja. Ia kemudian pindah ke Medan dan di daerah baru itu ia terkenal sebagai pengacara membela kepentingan rakyat.<sup>10)</sup>

Daerah Sumatera Utara pada waktu itu terkenal sebagai daerah poenale sanctie. Selain dari pada itu Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga memimpin sebuah surat kabar yang bernama "*Matahari Indonesia*". Melalui surat kabarnya itu Iwa Kusuma Sumantri selalu mengkeritik pemerintah Hindia Belanda dalam tulisan-tulisannya. Tokoh-tokoh pergerakan di Medan juga banyak menulis dalam surat kabar Matahari Indonesia yang menyebabkan Iwa Kusuma Sumantri makin dicurigai pemerintah Hindia Belanda. Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga dipilih menjadi ketua "*Persatuan Motoris Indonesia*", (PMI) dan ketua Perkumpulan Sekerja "*Opium Regie Bond Luar Jawa dan Madura*" (ORBLOM). Di samping itu Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga diminta untuk duduk sebagai penasehat dari *Indonesisch National Advindere Organisatie* (I N P O).

Di Medan ini jugalah Mr. Iwa Kusuma Sumantri bertemu dengan gadis Kuraisin yang kemudian menjadi Ny. Iwa Kusuma Sumantri. Mr. Iwa selalu hidup rukun dengan isterinya sampai akhir hayatnya. Mereka dikurniai enam orang anak, lima putri dan satu putera. Sewaktu meninggal dunia anak-anak Iwa Kusuma Sumantri telah dewasa seluruhnya dan sebagian besar telah berumah tangga.<sup>11)</sup>

Selain aktif di lapangan politik pergerakan Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga membantu orang-orang Kristen di daerah Batak. Ia memperjuangkan agar orang-orang Batak asli dapat diangkat menjadi pendeta Kristen yang sebelumnya hanya dimonopoli oleh pendeta-pendeta kulit putih. Hasil perjuangan Iwa Kusuma Sumantri ini sampai sekarang ini tidak dapat dilupakan oleh masyarakat Kristen Batak.

Sikap dan tindak tanduk Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang progresif revolusioner dianggap membahayakan pemerintah Hindia Belanda. Itulah sebabnya dalam Bulan Juli 1929 Iwa ditangkap dan disekap dalam penjara.<sup>12)</sup>

Setelah melalui keputusan pemerintah Hindia Belanda maka Mr. Iwa Kusuma Sumantri dibuang dan diasingkan ke pulau Banda Neira pada tahun 1930. Di Banda Neira telah lebih dahulu diasingkan Ir. Cipto Mangunkusumo selama satu setengah tahun. Setelah Mr. Iwa Kusuma Sumantri dibuang, maka menyusul pula Moh. Hatta dan Sutan Syahrir diasingkan ke Banda Neira. Iwa Kusuma Sumantri kemudian diikuti oleh keluarganya ke Banda Neira.<sup>13)</sup>

Menjadi tahanan politik bisa menyebabkan seseorang putus asa, karena tahanan politik tidak tahu secara pasti beberapa lama harus disekap begitu dan di pisahkan dari orang banyak. Kalau tahanan kriminal sudah tahu beberapa lama ia ditahan dan beberapa lama ia akan keluar. Selama dibuang di pulau terpencil itu selama sepuluh tahun 7 bulan, Mr. Iwa Kusuma Sumantri sempat mempelajari dan memperdalam agama Islam serta isi Al Qur'an. Hal ini sangat berguna bagi Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan makin memperdalam keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>14)</sup>

Pada tahun 1941 dengan status sebagai tahanan Mr. Iwa Kusuma Sumantri dipindahkan ke Makasar. Kemudian atas permintaannya oleh pemerintah Hindia Belanda diizinkan untuk mengajar di sekolah Taman Siswa di Makasar. Sewaktu Jepang memasuki kota Makasar pada tanggal 8 Pebruari 1943, Iwa Kusuma Sumantri dan keluarganya menyingkir ke luar kota. Tetapi kemudian dicari oleh Jepang dan diminta untuk membantu walikota Makasar Nadjamudin Daeng Malewa.

Mr. Iwa Kusuma Sumantri kemudian berusaha pindah ke Jawa, karena ia merasa terancam di daerah itu. Jepang telah mulai melakukan operasi pembersihan terhadap intelegensia Indonesia di luar Jawa, dan hal itu telah dilakukan di Banjarmasin. Berkat pertolongan Tuhan maka usaha Mr. Iwa Kusuma Sumantri untuk pulang ke Jawa berhasil juga.



Sesampai di Jakarta Iwa bekerja lagi sebagai advokat bersama Mr. Maramis. Di samping itu juga ikut membantu kantor research Kaigun cabang Jakarta yang waktu itu dipegang oleh Mr. Achmad Subarjo. Oleh sebab itu hubungan Mr. Iwa dengan Mr. Subarjo dengan Laksamana Maeda sangat erat. Begitupun kegiatan persiapan proklamasi yang dibicarakan di rumah Laksamana Maeda juga diketahui dan diikuti oleh Mr. Iwa Kusuma Sumantri. <sup>15)</sup>

## B MENTERI SOSIAL RI PERTAMA

Pada saat menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Mr. Iwa Kusuma Sumantri banyak memegang peranan dalam mempersiapkan naskah Proklamasi. Naskah Proklamasi yang semula diberi judul "Maklumat Kemerdekaan", ikut diusulkan untuk diubah judulnya oleh Mr. Iwa Kusuma Sumantri. <sup>16)</sup>

Dalam pada itu Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga ikut menyusun UUD 1945 dan dia pulalah yang mengusulkan agar ditambahkan aturan tambahan pada UUD 45 tersebut. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan pada tanggal 5 - 9 - 1945 dibentuk kabinet Presidentil, Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi Menteri Sosial dan Perburuhan dalam kabinet RI yang pertama itu. <sup>17)</sup>

Sebagai Menteri Sosial dan Perburuhan tugas Mr. Iwa Kusuma Sumantri cukup berat. Ia harus menerima kembali romusha dari berbagai daerah yang dipekerjakan di dalam negeri dan di luar negeri untuk dikembalikan ketempat asalnya. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi dan kesehatan mereka jauh dari memuaskan.

Departemen sosial juga berkewajiban memelihara fakir miskin yang waktu itu banyak bergelimpangan di jakarta.

Orang-orang ini sebelumnya tidak pernah diurus oleh Jepang. Departemen Sosial dan Perburuhan juga berhasil mengadakan Kongres Tani yang pertama dalam alam Indonesia Merdeka pada tanggal 8 - 9 Nopember 1945 di kota Solo.18)

Kabinet Presidentil ini tidak berumur lama, karena pada tanggal 14-11-1945 diganti dengan kabinet Parlementer I yang dipimpin oleh Sutan Syahrir. Mr. Iwa Kusuma Sumantri tidak ikut lagi dalam kabinet ini, tetapi ia masih tetap menyumbangkan tenaganya pada negara. Mr. Iwa Kusuma Sumantri aktif ikut mengumpulkan dana bantuan dan sumbangan sosial, dan ikut mendirikan „Palang Merah Indonesia.. (PMI) bersama Dr. Buntaran. 19)

Dalam lapangan politik Mr. Iwa Kusuma Sumantri kemudian melakukan oposisi terhadap Syahrir, sehingga dalam "Peristiwa 3 Juli" ia ikut ditangkap bersama-sama tokoh lainnya seperti Tan Malaka, Mr. Moh. Yamin Mr. Achmad Subarjo, Dr. Buntaran dan lain-lainnya. Setelah dipindah-pindahkan dari satu penjara ke penjara lainnya, maka akhirnya Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan kawan-kawan diberi grasi oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 1948.

Mereka kembali direhabilitasi karena tidak terbukti kesalahannya Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga ikut berjuang bersama-sama dengan pemuda mempertahankan daerah Bogor, Cianjur dan Purwakarta. Ia pernah ditahan oleh pengikut Amir Sjarifuddin di Cianjur, walaupun pada waktu itu Mr. Iwa sedang berjuang di front Bogor, Cikampek dan Purwakarta. 20)

Setelah berjuang menahan Sekutu yang akan masuk ke Bandung tidak menguntungkan lagi, maka Mr. Iwa pindah ke Subang dan kemudian ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta Mr. Iwa pindah lagi ke Solo dan akhirnya ia menetap di Tawang Mangu. Sewaktu Jenderal Sudirman beristirahat di Tawang Mangu, Mr. Iwa Kusuma Sumantri pernah mengunjungi Panglima Besar.

Sewaktu Belanda melancarkan agresi yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dan menduduki kota Yogyakarta, maka Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga ikut ditangkap bersama-sama dengan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta serta pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya. Setelah perjanjian Roem Royen ditanda tangani, maka pemimpin Indonesia yang ditahan oleh Belanda dilapaskan kembali termasuk Mr. Iwa Kusuma Sumantri.<sup>21)</sup>

Atas desakan kawan-kawannya, maka pada tahun 1949, Mr. Iwa Kusuma Sumantri memasuki Partai Murba. Tetapi ketika ia menjadi anggota DPR Pusat Mr. Iwa tidak mewakili partai Murba, tetapi mewakili fraksi Progresif.

Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi peristiwa yang cukup menggoncangkan negara, sehingga kabinet Wilopo terpaksa menyerahkan mandatnya. Sebagai gantinya pada tanggal 30-7-1953 dibentuk kabinet Ali Sastroamijoyo, dimana Mr. Iwa Kusuma Sumantri ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan mewakili fraksi Progresif.<sup>22)</sup>

Selama menjadi menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusuma Sumantri telah banyak melakukan perbaikan untuk kepentingan ABRI. Ia mengusulkan Undang-Undang Pertahanan dan menjadikan daerah Jakarta Raya menjadi daerah militer tersendiri lepas dari Jawa Barat. Perjuangan ini kemudian berhasil yaitu dengan dibentuknya Kodam V Jaya. Mr. Iwa juga memperjuangkan agar asrama ABRI diperhatikan dan juga pensiun bagi janda Pahlawan. Mr. Iwa Kusuma juga memperhatikan pendidikan di kalangan ABRI karena itu ia mengusulkan agar perwira-perwira ABRI diberi pendidikan di luar negeri.<sup>23)</sup>

Sebagai Menteri Pertahanan pada waktu itu tugas Mr. Iwa cukup berat. Ia terpaksa menghadapi banyaknya pemberontakan di daerah-daerah seperti pemberontakan DT/TII di Aceh

dan Jawa Barat. Mr. Iwa menentang setiap pemberontakan itu, namun ia juga tidak menyetujui sikap pemerintah yang Jakarta Sentris pada waktu itu.

Setelah kabinet Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya pada tahun 1955, Mr. Iwa tidak aktif lagi dalam bidang pemerintahan dan politik. Sebagai seorang swasta ia kembali lagi ke daerah asalnya dan ikut aktif pada badan Musyawarah Sunda. Mr. Iwa pernah difitnah oleh lawan politiknya dan dituduh menentang kebijaksanaan Presiden Sukarno. Ia pernah ditangkap di Malang, tetapi karena terbukti tidak bersalah Mr. Iwa dibebaskan kembali. Bahkan Mr. Iwa ditarik ke Jakarta untuk menjadi anggota Dewan Nasional yang baru dibentuk Presiden Sukarno.<sup>24)</sup>

Tahun 1958 Mr. Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi Rektor Universitas Pajajaran di Bandung. Selama menjadi Rektor banyak perubahan-perubahan yang diadakannya, di antaranya mengganti sistem perpeloncoan dengan masa perkenalan biasa sesuai dengan alam kemerdekaan. Kemudian ia juga mengusulkan diadakannya undang-undang Perguruan Tinggi untuk memperbaiki mutu pendidikan. Dalam pada itu jabatannya sebagai guru besar (Propesor) juga di kukuhkan oleh pemerintah sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Pada tahun 1961 pemerintah membuat suatu Departemen baru yaitu Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) sebagai pecahan dari Departemen P & K. Yang ditunjuk memimpin Departemen baru itu adalah Prof. Iwa Kusuma Sumantri S,H. Selama menjadi Menteri PTIP Mr. Iwa mengadakan peremajaan dikalangan tenaga pengajar.

Pada waktu itu masih banyak Rektor dan Dosen yang sudah terlalu tua dan banyak pula diantara mereka yang masih berjiwa Belanda. Oleh sebab itu Mr. Iwa mengusulkan untuk

mengadakan pembersihan terhadap sisa-sisa Belanda ini. Karena tidak sesuai dengan alam kemerdekaan. Sikapnya banyak ditafsirkan orang sebagai sikap yang reaksioner, dan itulah sebabnya banyak yang tak menyetujui kebijaksanaan Mr. Iwa.

Pada suatu saat ia dipanggil Presiden Soekarno dan secara singkat di tanya mengapa ia sebagai Menteri PTIP mengambil kebijaksanaan yang reaksioner. Mr. Iwa mengatakan bahwa mereka yang tidak menyetujui kebijaksanaan itu sebenarnya yang reaksioner. Untuk menghindari perpecahan dan pertentangan yang berlarut-larut, maka akhirnya Mr. Iwa dipindahkan dan diangkat sebagai Menteri Negara oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962.<sup>25)</sup>

Dari tahun 1962 - 1966 Profesor Iwa Kusuma Sumantri diangkat oleh Presiden menjadi Menteri Negara. Dalam pembentukan Kabinet 100 Menteri pada tahun 1966 Mr. Iwa tidak diikuti lagi oleh Presiden Soekarno. Ia bersama-sama dengan tokoh penting seperti Jenderal DR. A.H. Nasution disingkirkan dari Kabinet.

Mulai tahun 1966 Mr. Iwa memasuki masa pensiun dari semua jabatan pemerintahan. Untuk memanfaatkan waktu ia sibuk menulis sampai akhirnya hayatnya. Karya-karya yang pernah dihasilkan oleh Mr. Iwa yang dicetak dan dipublikasikan berjumlah sembilan buah :

1. Ilmu Hukum Keadilan.
2. Revolusionalisasi Hukum Indonesia
3. Sejarah Revolusi Indonesia, Jilid I.
4. Sejarah Revolusi Indonesia, Jilid II.
5. Sejarah Revolusi Indonesia, Jilid III.
6. Ke arah perumusan Konstitusi Baru.
7. Pengantar Ilmu Politik

8. Pokok-pokok Ilmu Politik
9. Pemberontakan 30 September 27).

Kemudian sebuah naskah autobiografi dan tentang Islam di Indonesia belum dapat diterbitkan. Mendekati masa akhir hayatnya Profesor Iwa dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena menderita penyakit jantung. Setelah beberapa waktu dirawat, maka pada hari Sabtu tanggal 27 September 1971 jam 21.07 Profesor Iwa Kusuma Sumantri wafat di Paviliun Cendrawasih RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta.

Sebelum jenazah dimakamkan lebih dahulu disemayamkan di tempat kediamannya Jalan Sabang No. 34 Jakarta. Sebagai seorang Perintis Kemerdekaan Profesor Iwa berhak di makamkan di Taman Pahlawan Kali Bata, tapi karena permintaan keluarganya dan pesannya sendiri waktu akan meninggal, akhirnya beliau dimakamkan di pemakaman Karet.

Banyak sahabat, kenalan dan tokoh-tokoh serta pejabat-pejabat tinggi negara datang untuk memberikan penghormatan terakhir dan menyediakan waktu untuk melayat. Diantara pejabat-pejabat tinggi Negara adalah : Menteri Kehakiman Profesor Oemar Senoaji SH, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud, Menteri P & K Mashuri SH, dan Gubernur DKI Ali Sadikin. Walaupun Upacara pemakaman di Karet, tetapi upacara itu tetap diadakan secara kenegaraan, dimana Menteri Sosial Mintareja SH bertindak sebagai Inspektur Upacara karena Iwa Kusuma Sumantri adalah Menteri Sosial RI yang pertama.<sup>28)</sup>

## CATATAN

1. Majalah Selecta 27-12-1971, *Prof. H. Iwa Kusuma Sumantri SH (1969 - 1971)*, Jakarta 1971 hal II
2. Harian Kami 29-12-1971, *Iwa Kusuma Sumantri Wafat*, Jakarta 1971 hal 2
3. Majalah Selecta, *opcit*, hal 12
4. Akhmad Subarjo Yayodisuryo, *Peranan Ide ide Dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*, Idayu Jakarta 1975, hal 26
5. Mardanas Safwan, *Peranan Gedung Kramat Raya 106 Dalam Melahirkan Sumpah Pemuda*, Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta 1973, hal 22.
6. Majalah Selecta, *opcit*, hal 12
7. *Ibid*, hal 11
8. *Ibid*, hal 12
9. A.K. Pringodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat Jakarta, 1960, hal 71
10. *Majalah Selecta, opcit*, hal 12
11. *Ibid*, hal 11
12. *Ibid*, hal 12
13. AK Pringodigdo, *opcit*, hal 125
14. *Majalah Selecta, opcit*, hal 12
15. Mardanas Safwan, *Peranan Gedung Menteng Raya 31 Dalam Perjuangan Kemerdekaan*, Dinas Museum & Sejarah DKI Jakarta 1973 hal 32.
16. *Majalah Selecta, opcit*, hal 42
17. *Almanak Umum Nasional 1953*, Endang Jakarta 1955 hal 40
18. Iwa Kusuma Sumantri, *Sejarah Revolusi Indonesia jilid II Grafika Jakarta* hal 51
19. *Majalah Selecta. opcit*, hal 42
20. Iwa Kusuma Sumantri, *opcit*, hal 22
21. *Ibid*, hal 202
22. *Almanak Umum Nasional 1953, opcit*, hal 61
23. *Majalah Selecta, opcit*, hal 42
24. *Ibid*, hal 42
25. *Ibid*, hal 42
26. Harian Kami, *opcit*, hal 2
27. *Majalah Selecta, opcit*, hal 42
28. Harian Kami, *opcit*, hal 2

## BAB II

### PERJUANGAN IWA KUSUMA SUMANTRI PADA ZAMAN PERGERAKAN NASIONAL

#### A. PERKUMPULAN MAHASISWA INDONESIA DI NEGERI BELANDA.

Dalam perang Dunia I dari 1914 - 1918 pemerintah Belanda bersikap netral sehingga lalu lintas antara Indonesia dan Belanda tidak begitu sulit. Pemuda Indonesia yang ingin melanjutkan sekolahnya di Negeri Belanda dapat melaksanakan keinginannya.

Berhubung dengan pulihnya lalu lintas tersebut maka yang pertama-tama mempergunakan kesempatan itu ialah tiga pemuda pelajar yang hendak meneruskan studinya pada salah satu universitas di Belanda. Tiga pelajar itu ialah, Nazir DT. Pamuncak, Alex Andreas Maramis dan Achmad Subarjo.<sup>1)</sup>

Sebelum perang dunia ke I pelajar-pelajar Indonesia di Belanda masih sedikit, hanya beberapa orang saja, dan sama sekali buta politik. Tapi anehnya tatkala Budi Utomo didirikan di Indonesia pada tahun 1908, pelajar-pelajar di Belanda merasa perlu mendirikan pula perkumpulan pelajar yang mereka beri nama : "*Indische Vereeniging*". Perkumpulan ini bergerak dibidang sosial - budaya dan mendapat sokongan penuh dari pihak Belanda, terdiri dari orang-orang Belanda terkemuka yang berpengaruh.

Kalau di Indonesia Budi Utomo didirikan oleh pemuda Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo, pelajar-pelajar pada Sekolah Kedokteran S.T.O.V.I.A, maka di negeri Belanda *Indische Vereeniging* didirikan oleh pelajar-pelajar pada berbagai universitas dan sekolah Tinggi yakni :



1. Sosrokartono, mahasiswa Universiteit Leiden, Fakultas Sastra jurusan Bahasa-bahasa Timur (Oostersche Letteren) kakak dari R.A. Kartini.
2. Husein Jayadiningrat, Mahasiswa Universiteit Leiden, Fakultas Sastra jurusan Bahasa-bahasa Timur (Oostersche Letteren).
3. Notosuroto, Mahasiswa Universiteit Leiden, Fakultas Hukum.
4. Notodiningrat, Mahasiswa *Technische Hoogeschool* (Sekolah Tehnik Tinggi) di Delft.
5. Sumitro Kolopaking, Mahasiswa Fakultas *Indologie* di Delft.
6. Sutan Casyangan Soripoda, Mahasiswa Sekolah Perguruan Tinggi di Haarlem.
7. Apituley, Mahasiswa Universitas Amsterdam, Fakultas Kedokteran.<sup>2)</sup>

Dalam pada itu pergerakan kebangsaan di Indonesia berjalan paralel dengan pergerakan pelajar-pelajar Indonesia di Eropa. Setiap peristiwa di Indonesia yang terjadi sebagai akibat konfrontasi antara Pemerintah Kolonial Belanda dan pergerakan kebangsaan Indonesia merupakan dorongan bagi para pelajar Indonesia di Negeri Belanda untuk ditinjau, di analisa dan diberikan komentar dalam majalah perkumpulan mereka yang dinamakan Hindia Putra, kemudian diroboh dengan nama Indonesia Merdeka.

Sebaliknya segala kejadian yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas para pelajar Indonesia di Eropah menimbulkan rasa solidaritas, dan merupakan bantuan moril dan materil dari para pemimpin gerakan nasional di Indonesia bagi gerakan-gerakan pelajar-pelajar Indonesia di Eropah. Adanya hubungan dalam pergerakan nasional yang berlangsung di Tanah Air dan luar negeri tidak disadari, sering-sering dilupa-

kan oleh kebanyakan kaum pergerakan di Indonesia, baik oleh beberapa partai politik maupun oleh pengikut-pengikutnya. Padahal pergerakan kebangsaan di Tanah Air dan di luar Negeri merupakan suatu gerakan kemerdekaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, kait mengkait, dorong mendorong, saling memberikan ide-ide yang berharga bagi perkembangan pergerakan Kemerdekaan.

Indische Vereeniging yang didirikan dalam tahun 1908 itu pada permulaannya bersifat sosial budaya. Perkumpulan ini berhubungan dengan beberapa pemuka-pemuka dalam masyarakat Belanda, mereka memang bertujuan untuk membimbing para pelajar Indonesia dalam rangka politik etis yang berlandaskan prinsip "*Cooperation and association*,"<sup>3)</sup>

Kegiatan Indische Vereeniging adalah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan bagi anggota-anggotanya dan para pendukung Belanda. Dalam pertemuan itu sering diadakan ceramah oleh ahli-ahli bangsa Belanda di bidang pengetahuannya. Disamping itu para anggota Indische Vereeniging sering diundang makan ditempat kediaman para pelindung dan para penyokong perkumpulan itu. Yang giat mengadakan kontak dengan para anggota Indische Vereeniging adalah Mr. Abendanon bekas kepala Pendidikan di Hindia Belanda. Tokoh inilah yang berhubungan erat dengan Raden Ajeng Kartini dan keluarganya, langsung dikabupaten Jepara atau tidak langsung dengan respondensi.

Disamping keluarga Abendanon, pelajar-pelajar Indonesia pada waktu itu juga sering didekati oleh janda Mr. Van Deventer yang berusaha agar para pelajar itu merasa tidak terasing di Negeri Belanda, diajaknya mendengarkan konser-konser, musik klasik atau diajak menonton pertunjukan-pertunjukan drama atau komidi di theater. Prof. Dr. Snouck Hurgronje,

bekas Penasehat Pemerintah Hindia Belanda yang menganjurkan politik "*Cooperation and association*., terhadap Indonesia, memberikan bimbingan pula.

Perang Iunia ke-I meletus dan berlangsung empat tahun lamanya (1914 - 1918). *Indische Vereeniging* mulai memperhatikan soal-soal politik berhubung dengan kejadian-kejadian di Indonesia dan Nederland sendiri.

Pengasingan tiga orang terkemuka dari Indonesia yang datang di Nederland sewaktu perang membawa pengaruh besar di kalangan *Indische Vereeniging*. Tiga orang terkemuka itu ialah : Dr. Cipto Mangunkusumo, R.M. Suwardi Suryaningrat dan EFE Douwes Dekker, pemimpin-pemimpin *Indische Partij* yang dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena dianggap membahayakan ketentraman dan ketertiban umum (*rust and orde*).

Pada hakekatnya mereka diasingkan berhubung tulisan Suwardi Suryaningrat (kemudian bernama Ki Hajar Dewantara) berjudul : *Als ik een Nederlander was*., (Jika saya seorang Belanda). Ditulisnya brosur ini karena akan dirayakan di Indonesia Hari Ulang Tahun ke 100 pembebasan Nederland dari Penjajahan Perancis dibawah Raja Lodewijk Napoleon, saudara kandung Napoleon Bonaparte, kaisar Perancis.<sup>5)</sup>

Dikemukakan oleh Suwardi Suryaningrat dalam brosur itu kurang lebih sebagai berikut: „Jika saya seorang Belanda saya tidak akan merayakan Hari Ulang Tahun Pembebasan Tanah Air di tengah-tengah rakyat yang sedang dijajah” Brosur ini menimbulkan amarah Bangsa Belanda dan Pemerintah Kolonial sehingga diambil tindakan seperti tersebut diatas.

Kesadaran politik di kalangan *Indische Vereeniging* kemudian diperkuat lagi oleh peristiwa kedatangan suatu "*Comite Indie Weerbaar*" (Panitia Ketahanan Hindia Belanda)

yang mengajukan usul kepada Pemerintah Belanda untuk memperkuat ketahanan Hindia Belanda diwaktu perang dengan melatih orang-orang Indonesia di bidang militer. Panitia itu terdiri dari R.Ng. Dwijosewoyo, dari kalangan priyayi, Abdul Muis dari Serikat Islam dan Kolonel Rhemrev dari pihak Tentara Hindia Belanda (Kolonel Rhemrev sendiri adalah seorang Indo-Belanda). Usul panitia itu akhirnya ditolak oleh Pemerintah Belanda.<sup>6)</sup>

Bagaimanapun juga kedatangan mereka dan beradanya mereka di tengah-tengah masyarakat Indonesia di Nederland sangatlah bermanfaat bagi kemajuan kesadaran politik di kalangan Indische Vereeniging. Para pelajar tidak hanya berkewajiban untuk menuntut ilmu saja tetapi juga memikirkan bagaimana mereka dapat memperbaiki bangsanya sendiri.

Dalam pada itu perkembangan keadaan di Indonesia sangat menarik perhatian mereka, terutama janji Gubernur Jenderal Graaf Van Limburg Stirum pada bulan Nopember 1918 dimuka sidang Volksraad bahwa Pemerintah Kolonial akan berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan kearah sistim Pemerintahan Demokrasi sehingga Volksraad mendapat kedudukan sebagai Parlemen, tahap demi tahap.<sup>7)</sup>

Kedatangan angkatan Muda di Negeri Belanda pada akhir perang Dunia ke I, telah membawa angin baru yang segar, karena anggapan-anggapan lama/kolot mengenai kesukusukuan, perbedaan-perbedaan diantaranya yang terbesar oleh Pemerintah Kolonial dan oleh orang-orang kolonialis Belanda sendiri dalam rangka politik "divide et impera" disapu bersih oleh angkatan Baru pelajar-pelajar yang berbondong-bondong datang di Nederland untuk meneruskan pelajarannya. Meskipun muda mereka sudah mendapat pengalaman dalam gerakan pemuda Jong Sumatera, Jong Jawa, Jong Minahasa, Jong Ambon dan sebagainya.<sup>8)</sup>

Batas-batas kesukuan yang mereka rasakan di Indonesia lambat laun lenyap dalam alam pikiran mereka, tatkala mereka berada di Nederland. Hidup ditengah-tengah masyarakat asing dan sebagai pelajar bujangan berdiam disuatu kamar dalam ruangan kecil tanpa pekarangan yang ia sewa bulanan tanpa makan, menimbulkan perasaan rindu kepada Tanah Air, merasa berada dalam kekosongan, jauh dari ayah ibu dan saudara-saudaranya. Makan pagi, siang dan waktu malam mereka harus mencari sendiri, duduk dalam restoran sendiri, kalau ditegor baru menjawab dalam bahasa Belanda. Kalau pulang malam-malam mereka berada dalam kesepian lagi.

Hanya sedikit yang hidup „indekost,, artinya makan bersama keluarga yang menyewakan kamar atau makanan yang disediakan di ruang kamar sendiri. Untuk mengisi rasa kekosongan, mereka mencari kontak dengan orang-orang Indonesia yang belajar disana.

Bagi mereka yang membawa keluarga (isteri dan anak) tempat tinggalnya menjadi pusat pertemuan pelajar-pelajar yang akan mengadakan tukar pikiran atau diskusi. Tiap hari pasti ada seorang dua orang pelajar yang berbincang-bincang di rumah keluarga Indonesia itu.

Langsung atau tidak langsung keluarga itu ikut membangun, memupuk dan memajukan rasa persatuan, gotongroyong dan nasionalisme Indonesia. Demi sejarah pergerakan kebangsaan patut diperingati jasa-jasanya.

Mereka memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar untuk berkumpul di tempat kediamannya, seperti keluarga Suwardi Suryaningrat dalam waktu perang di Den Haag, keluarga Dr. Asikin di Wasstraati, Leiden, kemudian ditempati oleh keluarga Ali Sastroamijoyo yang meneruskan teradisinya, juga keluarga Dr. Buntaran Martoatmojo di Oegstgeest, Leiden.

Demikian pula di Amsterdam di mana banyak dokter-dokter Indonesia (*Indische Artsen*) meneruskan pelajarannya pada Universiteit Amsterdam.

Tempat-tempat kediaman Dr. Muchtar dan Dr. Syuib Pruhuman di van Eeghenstraat, Amsterdam sering didatangi oleh pelajar-pelajar dari Rotterdam, Den Haag, Leiden dan Utrisht. Meskipun masih bujangan, namun Bendoro Raden Mas Sukadari, Keponakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX., sering didatangi tempat kediamannya di Sibergstraat, Den Haag. Karena di sana senantiasa disediakan makanan, maka Bendoro Sukardi disebut Menteri Sosial, oleh para mahasiswa. 9)

Proses kesadaran kebangsaan diperlancar oleh pengetahuan sejarah perkembangan nasionalisme di Eropah sendiri, sejak masyarakat feodal terpecah belah oleh timbulnya negara-negara nasional (*national states*). Mereka sangat sibuk membaca teori mengenai nasionalisme, terdorong oleh keadaan di tanah air sendiri, yang terdiri ribuan pulau-pulau (*archipelago*).

Tidaklah memuaskan bagi mereka bahwa kesadaran akan persatuan adalah hanya akibat daripada kolonialisme Belanda, hal yang sering berulang-ulang diucapkan oleh pihak Belanda. Padahal kesadaran bernegara telah tertanam dalam hati sanubari rakyat Indonesia sejak adanya kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit, yang meliputi wilayah yang hampir sama dengan Republik Indonesia sekarang.

Dalam zaman modern dibutuhkan suatu teori yang masuk akal, yang menerangkan rasa persatuan yang timbul pada mereka sebagai pemuda-pemuda pelajar yang datang di Eropah setelah Perang Dunia I berakhir. Dalam pada itu tepatlah rumusan Ernest Renan seorang penulis Perancis yang dengan singkat menjawab pertanyaan " *Quest ce Qu'une nation*"

(Apakah Nation?). *C'est le desir d,etre ensemble,*, (Kemauan untuk hidup bersama). Hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, meskipun berbeda bahasa rakyatnya, seperti Belgia (dua bahasa, yakni Perancis dan Belanda), Switzerland (tiga bahasa yakni Perancis, Jerman, Italia).

Apalagi kalau bahasanya satu seperti halnya dengan bahasa Indonesia satu bahasa yang hidup dalam perkembangannya, suatu bahasa yang berakar dalam bahasa Melayu, sehingga apa yang dikatakan oleh orang asing bahwa Indonesia dari perbagai suku-suku dengan bahasa yang berbeda-beda tidaklah benar. Perbedaan itu hanya perbedaan dalam ucapan yang merupakan apa yang disebut dialec seperti bahasa Jerman yang dipakai/diucapkan oleh orang Jerman yang hidup di Swiss misalnya di Beiren Jerman Selatan berbeda dengan dialec Jerman dari utara, namun berakar pada asal yang sama <sup>10)</sup>

Segala usaha dari kolonialisme dengan politik *divide et impera* yang memudahkan penjajahan sebagai tantangan dibalas oleh para mahasiswa dengan usaha menemukan alasan kuat untuk membenarkan ide persatuan secara ilmiah.

Dalam pada itu mereka berusaha pula menghilangkan istilah Hindia Belanda dengan menggantinya dengan suatu nama lain. Karena tujuan mahasiswa adalah kemerdekaan Tanah Air, dan istilah Hindia Belanda pada saat tercapainya kemerdekaan, akan hilang pula. Bukan itu saja yang menjadi alasan untuk mencari nama sebutan untuk Tanah Air. Sering-sering mereka menghadapi orang Perancis atau Jerman atau bangsa Eropah lain menjawab pertanyaannya: "Tuan asal dari mana?" Pernah saya jawab : "Dari Jawa". Oh di sana ada banyak gula !.

Pulau Jawa terkenal sebagai jajahan yang mengexport banyak gula. Oleh karenanya para mahasiswa membutuhkan suatu nama sebutan yang tidak senantiasa mengingatkan akan

status penjajahan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menemukan nama yang mencerminkan negara kesatuan.

Atas usaha itu mereka temukan nama Indonesia. Nama Indonesia ini telah dipakai dalam hukum adat, yang berlaku dalam wilayah jauh lebih luas pada Tanah Air Indonesia sekarang. Suatu wilayah yang meliputi kepulauan Filipina, Taiwan, Madagaskar dan di berbagai pulau-pulau di samudra Pasifik sampai ke „Easter island,, (pulau Paska) dekat Chili. Nama Indonesia lebih dahulu dipakai oleh sarjana Jerman, Bastian dan sarjana Inggris, Logan, untuk menunjukkan wilayah hukum adat. Mereka ambil nama itu buat keperluan politik untuk mengganti nama Hindia Belanda.

#### B. Menjadi Ketua Indosische Vereeniging.

Perubahan nama seperti diutarakan di atas berhubungan erat pula dengan perubahan suasana politik di kalangan pelajar-pelajar Indonesia. Cina dan Belanda. Sejak tahun 1817 pelajar-pelajar tersebut tergabung dalam suatu "Verbond,, berupa Federasi, terdiri dari *Indische Vereniging* di bawah pimpinan Suwardi Suryaningrat dan Dr. Gunawan Mangunkusumo, Chung Hua Hui, perkumpulan peranakan Cina berasal dari Hindia Belanda di bawah pimpinan Dr. Yap Hong Tyun, dan perkumpulan pelajar-pelajar Belanda, seperti *Adelbursten vereniging cadetten Vereniging*, *Indologen-Vereniging* dan sebagainya di bawah pimpinan Mr. Jenkman<sup>11)</sup>.

Federasi itu dinamakan "Indisch Verbond van Studeerenden". Dasar dan tujuan federasi tersebut adalah kerja sama demi kepentingan Hindia Belanda kelak, disegala bidang, kalau mereka telah berada di Hindia Belanda.

Secara jujur dan ikhlas mereka mengadakan ikrar untuk bekerja sama. Namun di dalam federasi itu sudah ada benih



perpecahan karena masing-masing perkumpulan yang tergabung dalam federasi itu, mempunyai kepentingan yang bertentangan satu sama lain.

Hal itu terbukti dalam kongres yang diselenggarakan oleh *Verbond* di Wageningen, di Deventer dan di Den Haag. Tempat ini terlalu sempit untuk mengutarakan segala pandangan yang dikemukakan oleh masing-masing pemuka perkumpulan. Hal ini dapat dibaca panjang lebar dalam dokumen-dokumen yang bersangkutan.

Perlu dicatat disini bahwa *Verbond* itu bubar dalam tahun 1923. Kesimpulan dari pada pengalaman "kerja sama" dalam *Verbond* malahan memperdalam jurang perbedaan mengenai kepentingan masing-masing perkumpulan. Ide "non Cooperation" timbul baik di Nederland, maupun di Tanah Air.

Untuk mendapatkan gambaran secara kronologis daripada perkembangan perkumpulan pelajar-pelajar Indonesia di Nederland baiklah diutarakan di bawah ini sebagai berikut :

1. 1919 – 1921 Perkumpulan diketuai oleh Achmad Subarjo.
2. 1921 – 1922 Perkumpulan diketuai oleh Dr. Sutomo.
3. 1922 – 1923 Perkumpulan diketuai oleh Herman Karto-wisastro.
4. 1923 – 1924 Perkumpulan diketuai oleh Iwa Kusuma Sumantri.
5. 1924 – 1925 Perkumpulan diketuai oleh Nazir Datuk Pamuncak.
6. 1925 – 1926 Perkumpulan diketuai oleh Dr. Sukiman Wiryosanjoyo.
7. 1926 – 1930 Perkumpulan diketuai oleh Moh. Hatta.

Meskipun Moh. Hatta baru menjadi ketua mulai 1926 namun sebagai bendahara dalam tahun 1923 dan 1924 ia telah sibuk di belakang layar bersama Achmad Subarjo dan Mu-

hamad Nazif mengurus Redaksi majalah *Hindia Poetra* yang kemudian namanya diganti dengan *Indonesian Merdeka* dalam tahun 1923. Istilah itu dipakai untuk mencerminkan tujuan perkumpulan, yakni Kemerdekaan Tanah Air. <sup>12)</sup>

Dalam redaksi Moh. Hatta mulai dikenal sebagai orang yang rajin, teliti dan penuh dedikasi. Biasanya mereka bertiga berkumpul tiap hari Sabtu Moh. Hatta datang dari Rotterdam dan menginap dirumah Achmad Subarjo di Noorderinde 32 Leiden. Pada minggu sore ia kembali ke Rotterdam, berhubung hari Senen mulai kuliah-kuliah pada *Rotterdamsche Handels Hoogeschool*. <sup>13)</sup>

Sebagai taktik mereka sengaja tidak menyebut nama penulis artikel untuk menghindari pengawasan dari *Raadsman voor Studeerenden* pada *Departement van Kolonien* yang dapat menyukarkan keadaan pelajar yang turut aktif dalam perhimpunan Indonesia. Pernah orang tua seorang pelajar yang menjadi pejabat Pemerintah Hindia Belanda diancam agar meletakkan jabatannya, apabila ia tidak menasehati anaknya jangan turut aktif dalam politik.

Tahun 1923 *Indonesische Vereeniging* yang kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia memilih pengurus baru. Dalam pemilihan itu Iwa Kusuma Sumantri terpilih menjadi ketua perhimpunan.

Pengurus baru yang dipimpin Iwa Kusuma Sumantri, terdiri dari lima orang yaitu, :

Ketua	: Iwa Kusuma Sumantri
Sekretaris	: Y.B. Sitanala
Bendahara	: Mohamad Hatta
Komisaris	: R. Sastro Mulyono
Archivaris	: Darmawan Mangunkusumo. <sup>14)</sup>

Belanda dan orang pensiunan Belanda seperti bekas Gubernur, bekas Residen dan sebagainya yang pernah memegang jabatan pemerintahan di Hindia Belanda. Pers Belanda juga memberi berbagai komentar yang tajam mengenai tulisan-tulisan itu. Tidak diduga oleh mereka bahwa para pelajar Indoensia memiliki pengetahuan begitu mendalam mengenai soal-soal sejarah penjajahan Belanda, soal-soal aktual mengenai keadaan di Indonesia dan soal-soal mengenai politik internasional.

Setelah keluarnya *Gedenkboek*, maka pengawasan terhadap gerakan-gerakan pelajar Indonesia diperkuat oleh alat-alat intelijen Belanda.

Yang menulis artikel-artikel dalam *Gedenkboek* tersebut adalah :

Artikel pertama berjudul "*Terugblik*" (menengok ke belakang) ditulis oleh A.A. Maramis, mengenai perkembangan *Indische Vereniging* sejak 1908 sampai 1923.

Artikel kedua berjudul "*Opgang*" (Maju Kedepan) ditulis oleh Ahmad Subarjo mengenai perlunya perubahan semangat berdasarkan pandangan hidup yang dinamis agar bangsa Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan zaman modern untuk mempertahankan kehidupannya dengan kepribadian nasional yang bergerak.

Artikel ketiga berjudul : "*Nieuwe Banen*" (Jalan Baru) ditulis oleh Sakri Sunarto nama samaran Dr. Sukiman Wiryo-sanjoyo mengenai taktik dan strategi baru berlandaskan percaya pada diri sendiri, menggantikan politik oportunistis dan mengemis berdasarkan percaya pada keadilan dan prikemusiaan Pemerintah Kolonial.

Artikel keempat berjudul : "*Indonesia Inde Wereldgemeenschap*" (Indonesia dalam Masyarakat Dunia) ditulis oleh Mahamad Hatta, mengenai pentingnya kedudukan Indonesia

Sebagai landasan kerja pengurus baru telah disahkan keterangan pokok-pokok tujuan perhimpunan, antara lain : Indonesia Merdeka semata-mata dan hanya terletak pada adanya suatu bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti yang sebenarnya, karena hanya bentuk pemerintahan semacam itulah yang dapat diterima oleh rakyat.

Bentuk pemerintahan semacam ini harus dituju oleh tiap-tiap orang Indonesia menurut kecakapannya dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri bebas dari bantuan asing. Tiap-tiap perpecahan tenaga Indonesia, dalam bentuk apapun ditentang sekeras-kerasnya, karena hanya persatuan tenaga putera Indonesia dapat mencapai tujuan bersama itu.

Waktu menerangkan keterangan dasar itu kepada anggota dalam rapat Iwa Kusuma Sumantri mengatakan bahwa pengalaman di masa yang lampau menunjukkan bahwa perkumpulan tidak melihat jalan lain dari pada jalan non cooperation.

Sebelum ucapan Presiden Wilson bahwa tiap-tiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri, dilaksanakan dalam politik dunia, dasar kopersilah yang paling baik untuk Indonesia. Dengan menolak kerja sama dengan Belanda, Indonesia bekerja untuk membangun tenaga nasional.

Pada tahun 1923 itu juga Indonesische Vereniging merencanakan untuk merayakan Hari Ulang Tahun ke 15, sejak perkumpulan didirikan pada tahun 1908. Berhubung dengan itu mereka merencanakan menerbitkan suatu *Gedenkboek* untuk memperingati 15 tahun berdirinya perkumpulan. *Gedenkboek* itu baru dapat diterbitkan pada tahun 1924 berhubung dengan persiapan artikel, percetakan dan perngkosannya.

Penerbitan buku ini menggoncangkan Pemerintah Hindia

antara dua Samudera dalam perkembangan ekonomi dunia sejak dahulu kala.

Artikel kelima berjudul : "*Nationale Geschiedenis*" (Sejarah Nasional) ditulis oleh Mohamad Nazif mengenai perlunya didikan generasi muda dalam sejarah rakyat dan tanah air Indonesia agar mereka sadar akan peranannya dalam zaman lampau dan sejarah akan kemampuan dan kecakapannya bangsa Indonesia menghadapi masa depan dalam suasana merdeka.

Artikel keenam berjudul : "Indonesia ditengah-tengah Revolusi Asia" ditulis oleh Mahamad Hatta mengenai sejarah gerakan kemerdekaan di India dan proses pembaharuan pandangan hidup di Turki dibawah pengaruh dan pimpinan Mustafa Kamal.

Artikel ketujuh berjudul : "*Het Nationale Recht*" (Hukum Nasional) ditulis oleh Mohamad Nazif mengenai kewajiban generasi muda untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan berusaha agar hukum nasional dapat berkembang dengan baik; janganlah menganut pandangan bahwa hukum nasional tidak dapat dipakai dengan mengajukan agar memakai hukum Barat saja untuk dipergunakan dalam masyarakat Indonesia. Pandangan demikian dianggap gegabah, tidak menganal struktur masyarakat dan pandangan hidup rakyat Indonesia.

Artikel kedelapan berjudul: "*De Gang des Tijds*" (jalan-nya waktu) ditulis oleh Sulaiman, pelajar bahasa-bahasa Timur/*Faculteit Oesterche letteren* ) memberi peninjauan sejarah kolonial dari pada bangsa-bangsa Barat keseluruh pelosok dunia serta reaksi terhadap penjajahan itu. Dianjurkan olehnya untuk turut serta dalam gerakan pembebasan Tanah Air.

Artikel kesembilan berjudul : "*Vertaling Van ASTABRATA*" (terjemahan ASTABRATA dalam bahasa Belanda)

ditulis oleh R.Ng. Purbacaraka, tatkala beliau menjadi pembantu Prof. De Hazew dalam mengajar bahasa Jawa - pada Universitas Leiden. ASTABRATA adalah ajaran dan petunjuk-petunjuk bagi seorang raja, Kepala Negara atau pemimpin dalam melakukan pemerintahan yang bijaksana.

Artikel kesepuluh berjudul : "Kerjakanlah sendiri pendidikan dan pengajaran anak-anak kita". Ditulis oleh anggota P I yang namanya saya tidak ingat lagi.

Artikel kesebelas berjudul : "*Driehonderd Jaren Overheersching*" (Tiga ratus tahun penjajahan) ditulis oleh Darmawan Mangunkusumo yang intisarinya ia menganjurkan agar suatu bangsa yang menghormati diri sendiri harus sadar akan kebangsaannya dan akan haknya untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan bangsa asing.

Artikel keduabelas berjudul : "*De Vakbeweging In Indonesie*" (Gerakan Serikat Kerja) ditulis oleh seorang anggota yang namanya tidak teringat lagi, mengenai sejarah gerakan buruh di Indonesia.

Mula-mula gerakan ini terdiri dari buruh Belanda saja. Organisasi ini tidak menghendaki orang-orang Indonesia memasukinya, karena khawatir akan terdesak oleh orang Indonesia yang jumlahnya besar, sehingga buruh Belanda dan buruh Indonesia mempunyai organisasi sendiri. Namun berkat kuatnya organisasi Buruh Indonesia dan tuntutan mengenai jam kerja, penambahan upah dan pada umumnya perbaikan-perbaikan syarat-syarat kerja, nasib golongan buruh Indonesia mendapat tingkat hidup yang lumayan sebagai hasil perjuangan mereka.

Artikel ketigabelas berjudul : "*Communistische Invloeden in het Oosten*" (Pengaruh Komunisme di Timur) ditulis oleh Iwa Kusuma Sumantri. Artikel ini memberi gambaran perkem-

bangun pengaruh gerakan komunis dikalangan buruh di Timur pada Umumnya dan di Indonesia pada khususnya. 16)

Reaksi yang begitu hebat terhadap Gedenkboek diperhebat lagi oleh statemen yang diumumkan oleh pengurus P.I. dibawah pimpinan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo mengenai prinsip-prinsip yang harus dipakai oleh gerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan. Statemen itu berbunyi sebagai berikut

- a. Hanya suatu Indonesia yang merasa bersatu-padu, dengan menyampingkan perbedaan-perbedaan antara golongan-golongan masing-masing, dapat mematahkan kekuasaan kaum penjajah. Tujuan bersama yaitu kemerdekaan Indonesia menghendaki tewujudnya suatu massa aksi nasionalistis yang sadar bersandar pada kekuatan sendiri
- b. Ikut sertanya semua lapisan Rakyat Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan itu adalah juga suatu syarat yang mutlak benar-benar untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Unsur yang terpenting dan bersifat inti dalam setiap masalah politik kolonial yakni pertentangan dalam kepentingan antara penjajah dan yang tejajah. Kecenderungan dari politik kaum penjajah untuk membikin kabur dan menyelimuti unsur tersebut harus dijawab oleh pihak yang terjajah dengan mempertajam dan menegaskan segala pertentangan.
- d. Melihat pengaruh dari penjajah yang bersifat merusak dan menurunkan kesusilaan terhadap keadaan physis dan psychis dari kehidupan Indonesia itu perlu diusahakan sekeras-kerasnya supaya dibikin normal lagi keadaan rohaniah dan jasmaniah itu. 17)

Statemen P.I. tersebut adalah suatu rumusan yang berdasar atas analisa dari pada gejala kolonialisme pada umumnya

secara ilmiah. Dalam praktek statemen itu diperoleh dari pengalaman P.I. dalam pergaulan dengan pelajar-pelajar yang berasal dari India, Mesir, Siam, Anam (Viet Nam), Pilipina, Cina dan bagi kami pada waktu itu sangat dirasakan perlunya. Suatu teori yang dalam praktek dapat dilaksanakan oleh gerakan nasionalisme di Indonesia.

Disamping itu dari hubungan yang terdapat dalam waktu libur di Paris, London dan Berlin, mereka berhasil mendatangkan berbagai pemuka dari negara-negara Asia ke Nederland P.I. menyelenggarakan rapat-rapat, di Den Haag dimana mereka masing-masing mendapat kesempatan memberi ceramah mengenai sejarah dan gerakan kebangsaan di Negerinya. Patut diperingati disini antara lain Maryonode los Santos Almarhum, Presiden Manila University yang memberi ceramah mengenai sejarah kebangsaan Pilipina, Dr. Ali Emron, anggota Partai Wafd dari Mesir di bawah pimpinan Zaglul Pasja, K.M. Panikar dari India terkenal sebagai ahli sejarah, kemudian menjadi Duta Besar di Peking, Kairo dan Paris.

Sejak keluarnya Gedenkboek dan statemen Sukiman, Perhimpunan Indonesia terjun dalam gelanggang politik International. Anggota-anggota P.I. tersebar ke luar Nederland, Arnold Mononutu dijadikan wakil P.I. di Paris mempropagandakan cita-cita kemerdekaan disegala lapisan masyarakat Perancis, Muhammad Hatta dan Dr. Samsi Sastrowidagdo pergi ke Denmark, Swedia dan Norwegia mempelajari Organisasi kooperasi, Akhmad Subarjo sering pergi ke London, memelihara hubungan dengan orang-orang dari India, Burma, Ceylon (Srilangka) dan lain-lain negeri dari *British Commanwealth*.

Waktu libur musim panas, musim dingin senantiasa dipergunakan untuk pergi ke luar Nederland dan di mana saja oleh setiap anggota Perhimpunan Indonesia disebar luaskan cita-cita kemerdekaan Tanah Air. Patut disebut di sini jasa-jasanya



Muhammad Hatta, Muhammad Nazif, Iwa Kusumasumantri, Gatot Tarunamiharja, Abutari, Supomo Sastromulyono, dua saudara Buntaran dan Budhyarto Martoatmojo, Darmawan Mangunkusumo, Muhamad Ikhsan Djunaedi, Dahlan Abdullah, Sunario, Ali Sastroamijoyo. Mereka semua mempopulerkan nama Indonesia dan gerakan kemerdekaan Indonesia. 18)

Pada awal tahun 1927 Perhimpunan Indonesia turut serta dalam kongres yang diselenggarakan di Brussel. Delegasi Indonesia terdiri dari lima orang dengan Mohamad Hatta sebagai ketua. Kongres itu diadakan berhubung kejadian-kejadian di negara Cina dan Indonesia. Pembunuhan massal dilakukan oleh Jenderal Chiang Kai Shek di Kanton dan di Shanghai terhadap rakyat golongan buruh dan rakyat jelata. Mungkin akibat hasutan Inggris (menurut info yang tersiar) yang hendak mempertahankan kepentingan di negara Cina dan akibat bujukan kaum industrialis dan hartawan Cina (keluarga Soong dan Kung).

Disamping itu Pemerintah Hindia Belanda melakukan pengasingan (Interniran) besar-besaran ke Boven Digul di Irian Barat terhadap rakyat Indonesia berhubung dengan pemberontakan PKI di Jawa Barat dan Sumatra Barat akhir tahun 1926 pada awal tahun 1927. Dalam pada itu banyak orang-orang yang bukan anggota PKI turut diasingkan.

Kejadian-kejadian ini memancing rasa gusar orang-orang yang sadar diseluruh dunia bahwa perbuatan Pemerintah Cina dan Hindia Belanda bertentangan dengan perikemanusiaan, tidak dapat di pertanggung jawabkan atas dasar moral. Masalah kolonial menjadi pusat perhatian dunia sehubungan peristiwa-peristiwa berdarah, pergulatan, dengan kekerasan dan pemberontakan-pemberontakan setempat di berbagai daerah jajahan Asia dan Afrika. Dirasakan bahwa sesuatu harus dilakukan untuk memprotes terror, ancaman-ancaman dan

penindasan dengan kekerasan terhadap rakyat-rakyat di daerah jajahan dan setengah jajahan.

Usaha-usaha untuk menghimpun semua kekuatan-kekuatan anti penjajahan dan anti imperialisme, baik perorangan maupun organisasi-organisasi, telah dilakukan oleh beberapa organisasi buruh di Jerman. Sekretariat dari Panitia Pelaksana menyatakan bahwa jawaban-jawaban yang bersemangat telah diterima dari segala pelosok dunia dalam hubungannya dengan seruan untuk sebuah pertemuan di Brussel guna memperbincangkan cara-cara serta jalan-jalan melawan politik agresi dan penindasan kekuatan-kekuatan imperialisme.

Semula kongres dinamakan Kongres melawan penindasan kolonial dan imperialisme. Utusan-utusan dari 21 (duapuluh satu) negara dari lima benua: Asia, Afrika, Eropah dan Amerika (utara dan selatan) telah berdatangan di kota Brussel. Para utusan terdiri dari wakil-wakil berbagai organisasi dan tokoh-tokoh perorangan terkenal didunia. Kongres berlangsung di istana "Egmont" bekas rumah kediaman Pangeran Egmont yang telah memberontak demi keadilan dan kebenaran melawan Spanyol. Tempat ini sengaja dipilih sebagai tempat bersidang karena merupakan lambang penyanggah hati nurani manusia melawan praktek-praktek terhadap rakyat-rakyat yang lemah dan tidak berdaya yang berjuang untuk hak-haknya sebagai manusia.

Perutusan mewakili organisasi-organisasi yang beraneka ragam sifatnya: politik, militer, sosial dan keagamaan. Wakil-wakil dari partai-partai pekerja, serikat-serikat buruh, gerakan-gerakan pemuda dan gerakan-gerakan kebangsaan telah berkumpul di istana Egmont untuk suatu demonstrasi menentang kolonialisme dan Imperialisme.

Kongres ini membawa akibat yang sangat penting. Negara-negara penjajah bertindak segera dengan menjalankan suatu

politik yang garang dan reaksioner di daerah-daerah jajahannya. Pemerintah Belanda mengambil tindakan-tindakan penindasan terhadap tokoh-tokoh dari gerakan kemerdekaan nasional. Di Negeri Belanda maupun di Indonesia, penangkapan-penangkapan telah dilakukan. Ketua Perhimpunan Indonesia Muhammad Hatta dan tiga anggota lainnya yakni Mohammad Nazir Datuk Pamuncak, Ali Sastroamijoyo dan Abdul Majid Joyoadiningrat telah disekap dalam penjara untuk beberapa bulan menunggu pengadilan. Beberapa anggota lainnya antaranya Arnold Mononutu dan Ahmad Subarjo, termasuk daftar orang-orang yang akan ditangkap. Untunglah mereka ini diluar jangkauan polisi Belanda karena berada di luar negeri Belanda pada waktu itu.

Di Indonesia, PNI (Partai Nasional Indonesia) dituduh "akan menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda yang syah". Partai ini didirikan oleh lima orang bekas Anggota Perhimpunan Indonesia yang telah kembali di Indonesia, yaitu Iskak Cokroadisuryo Sunario, Budhyarto, Samsi Sastrowidagdo, Sartono bersama Ir. Sukarno dan Ir. Anwari, lulusan dari Sekolah Tehnik Tinggi di Bandung.

Ir. Sukarno diangkat sebagai Ketua PNI yang baru didirikan itu. Segera setelah mereka mulai kegiatan-kegiatannya Sukarno dan tiga orang pemimpin PNI lainnya, yakni Maskun, Gatot Mangkupraja dan Supriadinata, telah ditangkap dan diseret kemuka pengadilan "Landraad".<sup>19)</sup>

Alasan utama untuk menuntunnya ialah bahwa PNI tergabung dalam liga anti Imperialisme, meskipun hanya secara tidak langsung karena hubungannya dengan Perhimpunan Indonesia yang menjadi anggota Liga.<sup>20)</sup>

Setelah aktif memimpin dan berjuang di dalam organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) Mr. Iwa Kusumasumantri akhir-

nya kembali ke Indonesia. Sesampai di Indonesia ia langsung menjadi anggota PNI.<sup>21)</sup>

Kegiatan dan sepak terjang Iwa Kusuma Sumantri selama berada kembali di Tanah Air, terus diikuti oleh Pemerintah Hindia Belanda. Karena dianggap kegiatannya membahayakan Pemerintah Hindia-Belanda, maka dalam bulan Juli 1929 ia ditangkap dan disekap dalam penjara.<sup>22)</sup>

Setelah melalui keputusan pemerintah Hindia-Belanda maka Mr. Iwa Kusuma Sumantri akhirnya dibuang dan diasingkan ke Banda Neira. Di Banda Neira telah lebih dahulu dibuang dan diasingkan Dr. Cipto Mangunkusumo selama satu setengah tahun. Iwa Kusuma Sumantri kemudian diikuti oleh keluarganya ke Banda Neira. <sup>23)</sup>

Pada waktu dibuang ke Banda Neira, keluarga Iwa Kusuma Sumantri, telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, dua perempuan dan yang paling kecil adalah laki-laki. Tuti yang paling tua umurnya kira-kira 3 tahun, Tini yang kedua umurnya 2 tahun dan yang terkecil kira-kira 6 bulan. <sup>24)</sup>

Mr. Iwa Kusuma Sumantri sehari-hari kerjanya belajar bahasa Arab dan tafsir Qur'an dari Bahalwan, seorang peranakan Arab lahir di Banda Neira. Sungguhpun ia belum pernah pergi ke negeri Arab, ia pandai menceritakan keadaan negeri itu dan juga mengenai buah kurma seolah-olah ia bertahun-tahun tinggal di sana dan baru saja kembali ke Indonesia.<sup>25)</sup>

Pada akhir tahun 1935 tempat pembuangan Moh. Hatta dan Sutan Syahrir dipindahkan dari Digul ke Banda Neira. Kedatangan tokoh penting pergerakan nasional itu ke Banda Neira mendapat sambutan yang hangat dari Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan Dr. Cipto Mangunkusumo, beserta keluarga mereka.

Mr. Iwa Kusuma Sumantri mengirim seorang menjemput Moh. Hatta dan Sutan Syahrir sedangkan Dr. Cipto Mangunkusumo mengirim kedua anaknya Donald dan Louis. Moh. Hatta dan Sutan Syahrir bermalam di rumah Iwa Kusuma Sumantri. Mereka sekeluarga menerima dengan gembira kedatangan Moh. Hatta dan Sutan Syahrir. Malam itu Moh. Hatta dan Sutan Syahrir tidur dikamar muka sekali yaitu kamar Tuti dan Tini. <sup>26)</sup>

Sesudah Moh. Hatta dan Sutan Syahrir mendapat rumah sewaan, Ny. Iwa Kusuma Sumantri menolong mengurus hampir segala keperluan rumah tangga mereka, seperti kain pintu, pembantu rumah tangga dan keperluan lainnya. Malahan kopi dibawa oleh Ny. Iwa Kusuma Sumantri dari rumah untuk Hatta dan Syahrir.

Pada tahun 1939 Mr. Iwa Kusuma Sumantri dipindahkan ke tempat pembuangannya yang baru yaitu Makasar. Tinggalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Moh. Hatta dan Sutan Syahrir di Benda Neira. <sup>27)</sup>

Sesampai di Makasar, Mr. Iwa Kusuma Sumantri minta izin kepada pemerintah Hindia-Belanda untuk mengajar di sekolah Taman Siswa. Pada zaman pendudukan Jepang Mr. Iwa Kusuma Sumantri berhasil kembali ke Jakarta. Ia bekerja sebagai pengacara bersama Mr. Maramis dan juga ikut membantu kantor riset Kaigun cabang Jakarta yang dipimpin oleh Mr. Achmad Subarjo Joyodadisuryo. Dengan demikian hubungan antara Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Achmad Subarjo Joyoadisuryo dengan laksamana Maeda sangat erat. <sup>28)</sup>

## C A T A T A N

1. Achmad Subarjo Yoyoadisuryo, *Peranan Ide Ide Dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*, Yayasan Idayu Jakarta 1975 hal 17.
2. *Ibid*, hal 17
3. *Ibid*, hal 18
4. *Ibid*, hal 19
5. AK Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat Jakarta 1960, hal 26
6. *Ibid*, hal 16
7. Achmad Subarjo Yoyoadisuryo, *opcit*, hal 21
8. *Ibid*, hal 21
9. *Ibid*, hal 22
10. *Ibid*, hal 23
11. *Ibid*, hal 25
12. Mohamad Hatta, *Memoir*, Tintamas Jakarta 1978 hal 140
13. Achmad Subarjo Yoyoadisuryo, *opcit*, hal 26
14. Mohamad Hatta, *opcit*, hal 141
15. *Ibid*, hal 142
16. Achmad Subarjo Yoyoadisuryo, *opcit*, hal 29
17. *Ibid*, hal 30
18. *Ibid*, hal 31
19. Yusmar Basri (editor) *Sejarah Nasional Indonesia V*, Balai Pustaka Jakarta 1977, hal 221
20. Achmad Subarjo Yoyoadisuryo, *opcit*, hal 34
21. AK Pringgodigdo, *opcit*, hal 71
22. Majalah *Selecta* 27 - 12 - 1971 Prof. H Iwa Kusuma Sumantri SH (1899-1971) Jakarta, 1971, hal 12
23. AK Pringgodigdo, *opcit*, hal 125

24. Mohamad Hatta *opcit*, hal 365
  25. *Ibid*, hal 365
  26. *Ibid*, hal 365
  27. *Ibid*, hal 380
  28. Mardanas Safwan, *Peranan Gedung Menteng Raya 31 Dalam Perjuangan Kemerdekaan*, Dinas Museum Dan Sejarah DKI Jakarta 1973, hal 32.
-

### BAB III

## PERJUANGAN IWA KUSUMA SUMANTRI PADA ZAMAN KEMERDEKAAN

### A. PERJUANGAN AWAL

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang yang pertama kali di Gedung Kesenian Jakarta. Pada hari pertama sidang ini menghasilkan beberapa keputusan penting yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan serta landasan politik bagi Indonesia merdeka. Keputusan-keputusan itu adalah :

1. mengesahkan Undang-undang Dasar Negara.
2. memilih Presiden dan Wakil Presiden, yakni Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta.
3. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Pada hari berikutnya sidang PPKI memutuskan Sidang hari kedua ini menghasilkan keputusan dibentuknya 12 departemen, dan sekaligus menunjuk para pemimpin departemen (menteri) serta menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia (RI). Wilayah RI dibagi atas delapan provinsi yang juga sekaligus ditunjuk gubernurnya. Tentang tentara kebangsaan sidang memutuskan agar segera dibentuk. Pada sidang hari ketiga ternyata PPKI memutuskan lain mengenai tentara kebangsaan ini.

Kabinet Negara Republik Indonesia Pertama ini dibentuk pada tanggal 5-9-1945. Kabinet ini berbentuk Presidential Kabinet dengan Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.



Susunan lengkap dari kabinet ini adalah sebagai berikut :

- a. Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wirianatakusumah.
- b. Menteri Luar Negeri : Mr. A. Subarjo.
- c. Menteri Kehakiman : Prof. Mr. Dr. Supomo.
- d. Menteri Kemakmuran : Ir. R.P. Surachman.
- e. Menteri Keuangan : DR. Sanusi (kemudian diganti oleh Mr. A.A. Maramis).
- f. Menteri Kesehatan : Dr. Buntaran, Martoatmojo.
- g. Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara.
- h. Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusuma Sumantri.
- i. Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifuddin.
- j. Menteri Perhubungan : R. Abikusno Cokrosuyoso.
- k. Menteri Pekerjaan Umum : R. Abikusno Cokrosuyoso.
- l. Wk. Keamanan Rakyat : Mohamad Sulyoadikusumo.
- m. Menteri Negara : Dr. Amir.
- n. Menteri Negara : Wahid Hasyim.
- o. Menteri Negara : Mr. Sartono.
- p. Menteri Negara : Mr. A.A. Maramis.
- q. Menteri Negara : Otto Iskandar Dinata<sup>3)</sup>

Sebagai menteri sosial tugas Mr. Iwa Kusuma Sumantri cukup berat, ia harus menerima kembali rumusha dari berbagai daerah yang dipekerjakan di dalam negeri dan luar negeri untuk dikembalikan ke tempat asalnya. Mereka sudah tidak punya apa apa lagi dan kesehatan mereka sangat buruk.

Departemen sosial juga berkewajiban memelihara fakir miskin yang waktu itu banyak bergelimpangan di Jakarta; orang-orang ini sebelumnya tidak pernah diurus oleh Jepang. Departemen Sosial juga berhasil mengadakan kongres tani

yang pertama dalam alam Indonesia merdeka pada tanggal 8-9 Nopember 1945 di kota Solo <sup>4)</sup>.

Pada tanggal 23 Agustus Presiden Sukarno dalam pidato radionya menyatakan berdirinya tiga badan baru yaitu: Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR ini akan bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah; pimpinan pusat BKR tidak diadakan.

Pidato Presiden Sukarno tersebut mendapat sambutan dua macam dari pemuda-pemuda Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Pada umumnya timbul kekecewaan bahwa Pemerintah tidak segera membentuk tentara nasional. Tetapi sebagian besar pemuda terutama yang ex-anggota Peta, KNIL dan Heiho, artinya pemuda-pemuda yang sudah mempunyai pengalaman militer, memutuskan untuk membentuk BKR di daerah tempat tinggalnya dan memanfaatkan BKR itu sebaik-baiknya sebagai wadah perjuangannya. Sebagian lagi dari para pemuda Indonesia yakni yang pada jaman Jepang telah membentuk kelompok-kelompok politik, tidak puas dengan BKR, Setelah usul mereka mengenai pembentukan tentara nasional ditolak oleh Presiden dan Wakil Presiden, mereka menempuh jalan lain.<sup>5)</sup>

Mereka membentuk badan-badan perjuangan yang kemudian menyatukan diri dalam sebuah *Komite Van Aksi*, yang bermarkas di Jalan Menteng 31 di bawah pimpinan Adam Malik, Sukarni, M. Nitimiharjo, dan lain-lain. Badan-badan perjuangan yang bernaung di bawah Komite Van Aksi adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA) dan Barisan Buruh Indonesia (BBI).<sup>6)</sup>

Badan-badan perjuangan kembali dibentuk di seluruh Jawa seperti Barisan Banteng, Kebaktian Rakyat Indonesia

Sulawesi KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Hisbullah, Sabilillah, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) dan lain-lain. Badan perjuangan yang bersifat khusus adalah kesatuan-kesatuan pelajar (Tentara Pelajar, Tentara Zenie Pelajar, Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), yang berhubungan dengan tentara reguler lebih dekat.

Pembentukan badan-badan perjuangan ini tidak terbatas di Jawa melainkan juga di Sumatera. Di Aceh dibentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) dibawah pimpinan Syamaun Gaharu dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) kemudian menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) dibawah pimpinan A. Hasymi. Di Sumatera Utara dibentuk Pemuda Republik Indonesia Andalas. Pemuda Andalas di Sumatera Barat. Pemuda Republik Indonesia Barat. Sedangkan Barisan Pelopor pada bulan September telah menyatakan diri bernaung di bawah KNI<sup>7)</sup>.

BKR dan badan-badan perjuangan yang dibentuk oleh pemuda inilah yang memelopori perebutan kekuasaan dari tangan Jepang, mereka juga berusaha merebut senjata dan seringkali terjadi pertempuran-pertempuran dengan pihak Jepang. Disamping itu pemimpin Tentara Keenambelas Jepang di Jawa tidak pernah mau mengakui adanya Republik, karena adanya perintah dari pihak Serikat agar tetap memelihara status-quo sejak tanggal 15 Agustus 1945 tatkala Jepang menyerah. Masalah baru bagi para pemuda dalam melaksanakan perebutan kekuasaan ini adalah kedatangan pasukan Serikat.

Pasukan Serikat yang datang ke Indonesia ini dibawah Komando Asia Tenggara (Southeast Asia Command) di bawah pimpinan Laksamana Lord Mountbatten. Perwira Serikat yang pertama kali datang ke Indonesia, yakni pada tanggal 19 Sep-

tember 1945, adalah Mayor Greenhalgh yang terjun dengan payung di lapangan udara Kemayoran.

Tugas Greenhalgh adalah untuk mempersiapkan pembentukan markas besar Serikat di Jakarta. Kedatangan Greenhalgh kemudian disusul oleh kapal penjelajah Cumberland yang mendaratkan pasukannya di bawah pimpinan Laksamana Muda W.R. Patterson.

Pasukan Serikat yang bertugas di Indonesia ini merupakan komando khusus dari SEAC yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) yang mempunyai tiga divisi di bawah Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas daripada AFNEI di Indonesia adalah melaksanakan perintah Gabungan Kepala Staf Serikat yang diberikan kepada SEAC di antaranya ialah :

- 1). menerima penyerahan dari tangan Jepang.
- 2). membebaskan para tawanan perang dan intermiran Serikat.
- 3). melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.
- 4). Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil.
- 5). menghimpun keterangan tentang dan menuntut penjahat perang di depan pengadilan Serikat.

Kedatangan pasukan-pasukan Serikat ini disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Akan tetapi setelah diketahui bahwa pasukan Serikat Inggris ini datang membawa orang-orang NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang dengan terang-terangan hendak menegakkan kembali Hindia Belanda sikap pihak Indonesia berubah menjadi minimal curiga, maximal bermusuhan.

Situasi dengan cepat merosot menjadi buruk sekali setelah, NICA mempersenjatai kembali orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang. Orang-orang NICA dan KNIL di Jakarta, Surabaya, Bandung telah memancing kerusuhan dengan cara mengadakan provokasi-provokasi. Agaknya Christison telah memperhitungkan bahwa usaha pasukan-pasukan Serikat tidak akan berhasil tanpa bantuan Pemerintah Republik Indonesia. Karenanya Christison berunding dengan pemerintah RI dan mengakui de facto Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945.<sup>8)</sup>

Sejak adanya pengakuan de facto terhadap Pemerintah RI dan Panglima AFNEI itu, masuknya pasukan Serikat ke Wilayah RI diterima dengan terbuka oleh pejabat-pejabat RI, karena menghormati tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pasukan-pasukan Serikat dan karena penegasan Christison bahwa ia tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status kenegaraan Indonesia.

Namun kenyataannya adalah lain; di kota-kota yang didatangi oleh pasukan Serikat seringkali terjadi insiden-insiden bahkan pertemuan-pertemuan dengan pihak RI. Hal ini disebabkan karena pasukan-pasukan Serikat/Inggris tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia, baik pemimpin-pemimpin daerah maupun pimpinan nasional kita. Seperti yang terjadi di kota Jakarta sendiri beberapa orang anggota pimpinan nasional diteror bahkan meningkat sampai kepada percobaan pembunuhan. Di Surabaya, Magelang, Ambarawa, Semarang, Medan pecah pertempuran-pertempuran antara pasukan-pasukan Serikat dengan pemuda-pemuda Indonesia<sup>9)</sup>.

Pemerintah RI rupanya menginsyafi, bahwa hanya dengan Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk secara lokal tidak dapat diadakan perlawanan secara sentral, sehingga tidak

akan mungkin mengamankan perjuangan. Pemerintah kemudian memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo untuk disertai tugas menyusun tentara nasional.

Pada tanggal 5 Oktober dikeluarkan Maklumat Pemerintah, yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sebagai pimpinan TKR ditunjuk Suprijadi, tokoh pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) terhadap Jepang di Blitar dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim diangkat Moh. Suryoadikusumo seorang bekas daidanco PETA.

Dengan dasar Maklumat Pemerintah tersebut segera dibentuk Markas Besar Umum oleh Urip Sumoharjo dengan berkedudukan di Yogyakarta. Di pulau Jawa dibentuk 10 divisi dan di Sumatera 6 divisi. Kekuatan-kekuatan tersebut masih ditambah dengan puluhan badan perjuangan dari golongan pemuda.<sup>10)</sup>

Sementara itu perlawanan rakyat terhadap pasukan Serikat meningkat khususnya pada akhir 1945. Pihak Serikat merasa kewalahan dan Jenderal Christison menyatakan bahwa ia akan menggunakan kekuatannya untuk menegakkan keamanan dan ketertiban terutama di Jawa Barat karena daerah ini dianggap sebagai tempat merajalelanya terorisme. Pemimpin-pemimpin Indonesia dianggap tidak mampu dan tidak memiliki kekuatan untuk menguasai keadaan. Sudah tentu pernyataan ini mendapat sambutan hangat dari panglima angkatan perang Belanda Laksamana Helfrich yang memerintahkan kepada pasukannya untuk membantu pasukan Jenderal Christison melaksanakan tugas di Jawa Barat.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia sekali lagi memperingatkan pasukan Serikat, akan tugas-tugasnya yang semata-mata adalah melucuti dan mengembalikan tawanan Jepang,

dan tidak berhak mencampuri masalah-masalah politik. Masalah politik adalah semata-mata masalah Indonesia dan Serikat adalah sama yakni menegakkan keamanan dan ketertiban. Tidak amannya dan tidak tertibnya keadaan, disebabkan karena terror pihak gerombolan NICA. Dan perbuatan ini ditentang oleh rakyat Indonesia.

## B. PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

Di bidang politik pada bulan November 1945 Pemerintah mengeluarkan maklumat politik. Dinyatakan dalam maklumat tersebut bahwa Pemerintah menginginkan pengakuan terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dari Serikat maupun Belanda sendiri. Pemerintah RI bersedia membayar semua hutang-hutang Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II dan berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik asing yang telah dikuasai oleh Pemerintah.

Bersamaan dengan ini dikeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah menyukai berdirinya partai-partai politik sebagai sarana pembantu perjuangan. Sebagai realisasi daripada Maklumat Pemerintah tersebut kabinet presidetil yang dipimpin oleh Presiden, sendiri diganti dengan kabinet ministeril. Sebagai perdana menteri ditunjuk Sutan Sjahrir.

Pemerintah baru ini (Kabinet Syahrir) segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris. Pemerintah Inggris mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia, dan pemerintah Belanda diwakili oleh Letnan Gubernur Jenderal Dr. HJ. van Mook. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946, dalam awal perundingan itu van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang terdiri atas 6 fasal yang mengulangi

pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942 isi pokoknya ialah :

1. Indonesia akan dijadikan negara *commonwealth* berbentuk fedekasi yang memiliki self-government di dalam lingkungan Kerajaan Nederland.
2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedang untuk urusan luar negeri diurus oleh Pemerintah Belanda.
3. Sebelum dibentuknya *commonwealth* akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun.
4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. <sup>11)</sup>

Pihak Indonesia dalam perundingan itu belum memberikan usul balasannya, sementara suatu gabungan organisasi dengan nama Persatuan Perjuangan melakukan oposisi terhadap kabinet Syahrir. Mereka berpendapat bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan 100% terhadap Republik Indonesia.

Di dalam sidang KNIP di Solo (28 Februari – 2 Maret 1946) mayoritas suara menentang kebijaksanaan Syahrir. Karena oposisi yang terlalu kuat itu kabinet Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Tetapi kemudian Presiden menunjuk kembali Sutan Syahrir sebagai formatur kabinet dan kemudian ia menjabat lagi sebagai perdana menteri Kabinet Syahrir II). Kabinet Syahrir kedua dibentuk pada tanggal 12 Maret 1946. Kabinet ini menyusun usul balasan pemerintah RI, yang terdiri atas 12 fasal antara lain :

- a. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda.
- b. Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggung jawab Pemerintah RI.
- c. Federasi Indonesia – Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu, dan mengenai urusan luar negeri dan per-



- tahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda.
- d. Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan tentara Republik Indonesia.
  - e. Pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
  - f. Selama perundingan berlangsung semua aksi militer harus dihentikan dan pihak Republik akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan-tawanan Belanda dan interniran lainnya.<sup>12)</sup>

Usul balasan ini disampaikan kepada van Mook, akan tetapi pihak Belanda tidak dapat menerima baik usul balasan pemerintah RI tersebut, meskipun pihak Republik sudah memberikan konsesi-konsesi yang oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri sukar diterima.

Dengan bercermin kepada persetujuan yang pada tanggal 6 Maret 1946 dicapai antara Vietnam dengan Perancis, dimana Republik Vietnam akan merupakan negara bebas di dalam lingkungan *Federation Indo Chinese*, van Mook mengajukan usul pribadi untuk mengakui Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pembentukan negara federal yang bebas dalam rangka Kerajaan Belanda Wakil semua bagian Hindia Belanda dan wakil golongan minoritas akan berkumpul untuk menetapkan struktur negara Indonesia yang akan datang itu. Selanjutnya pasukan-pasukan Belanda akan mendarat untuk menggantikan tentara Serikat.

Pada tanggal 27 Maret 1946 Sutan Syahrir memberikan jawaban yang disertai naskah persetujuan dalam bentuk taktat yang isi pokoknya adalah :

- 1). Supaya pemerintah Belanda mengakui RI de facto atas Jawa dan Sumatera.
- 2). Supaya Belanda dan RI bekerjasama membantuk RIS.
- 3). Republik Indonesia Serikat bersama-sama dengan Nederland, Suriname, Curacao, menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda.

Dengan usul balasan pemerintah RI tersebut maka kedua belah pihak dianggap telah saling mendekati, karena itu perundingan perlu ditingkatkan. Perundingan di Jakarta antara Sutan Syahrir dan van Mook dengan disaksikan oleh Archibald Clark Keer berakhir. Hasil perundingan oleh van Mook akan diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Dengan perantaraan Clark Keer sekali lagi kedua pemerintah mengadakan perundingan di Hooge Veluwe (Negeri Belanda). Pemerintah RI mengirimkan delegasi yang terdiri dari Mr. Suwandi, Ir. Sudarsono dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo.<sup>13)</sup>

Delegasi RI berangkat ke Nederland pada tanggal 4 April 1946 bersama-sama dengan Sir Archibald Clark Keer Delegasi Belanda yang diajukan dalam perundingan ini adalah Dr. van Mook, Prof. Logemann, Dr. Idenburgh, Dr. van Royen, Prof. van Asbeck, Sultan Hamid, Surio Santoso. Di dalam perundingan itu ternyata pihak Belanda menolah rancangan hasil pertemuan Syahrir -- van Mook -- Clark Keer, terutama mengenai usul Clark Keer tentang pengakuan de facto atas Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera.

Pihak Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan de facto atas Jawa dan Madura saja, itupun dikurangi daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Serikat. Dan Republik Indonesia yang dimaksud itu harus tetap menjadi bagian dari kerajaan Nederland. Demikian juga campur tangan Republik

dalam menentukan perwakilan daerah-daerah di luar daerah Republik, ditolak pula.

Perundingan yang berlangsung selama 10 hari itu (14 – 25 April 1946) telah gagal. Untuk sementara waktu hubungan Indonesia – Belanda terputus. Tetapi pada tanggal 2 Mei 1946 van Mook kembali membawa usul pemerintahnya yang terdiri atas tiga pokok :

- a). Pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari persemakmuran (*gemeenebest*) Indonesia yang berbentuk federasi (serikat).
- b). Persemakmuran Indonesia Serikat di satu pihak dengan Nederland, Suriname dan Curacao di lain pihak akan merupakan bagian-bagian dari Kerajaan Belanda.
- c). Pemerintah Belanda akan mengakui de facto kekuasaan atas Jawa, Madura dan Sumatera dikurangi dengan daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Inggris dan Belanda.

Usul Belanda itu pada tanggal 17 Juni ditolak oleh Pemerintah RI karena dianggap tidak mengandung sesuatu yang baru. Adapun isinya usul balasan Pemerintah RI adalah :

- (1). Republik Indonesia berkuasa de facto atas Jawa, Madura, Sumatera ditambah dengan daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda.
- (2). Republik Indonesia menolak ikatan kenegaraan (dalam hal ini *gemeenebest*, *rijksverband*, koloni, *trusteeship territory* atau federasi ala Viet Nam) dan menghendaki penghentian pengiriman pasukan-pasukan Belanda ke Indonesia sedangkan pemerintah Republik tidak akan menambah pasukannya.

3). Pemerintah Republik menolak suatu periode peralihan (*Overgangsperiode*) di bawah kedaulatan Belanda.

Usul balasan pihak Indonesia ditolak oleh Belanda. Sementara itu di dalam negeri terjadi krisis politik. Dengan jatuhnya Kabinet Syahrir I, sebenarnya persatuan Perjuangan mengharapkan Tan Malaka yang ditunjuk sebagai formatur Kabinet. Tetapi Presiden Sukarno menunjuk kembali Sutan Syahrir (Partai Sosialis) sebagai formatur Kabinet. Persatuan Perjuangan tetap meneruskan oposisinya terhadap Kabinet Syahrir sekalipun program kabinet baru itu merupakan kompromi pendapat antara Persatuan Perjuangan dengan haluan politik semula Pemerintah.

Program kabinet baru itu tidak memuaskan golongan Tan Malaka dan kawan-kawannya. Karena itu Pemerintah mencurigai tindakan Tan Malaka dan kawan-kawannya yang menginginkan kedudukan pemimpin pemerintahan. Pada akhir bulan Maret beberapa tokoh politik khususnya dari Persatuan Perjuangan ditangkap. Menurut keterangan Pemerintah tujuan penangkapan adalah untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar akibat dari pada tindakan pemimpin-pemimpin politik itu, karena terdapat bukti-bukti bahwa mereka akan mengacaukan, melemahkan dan memecah persatuan.

Mereka tidak melakukan oposisi yang sehat dan loyal melainkan hendak melemahkan pemerintah. Ada indikasi kuat bahwa mereka akan merubah susunan negara di luar undang-undang. Mereka yang ditangkap adalah Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Tjokrosuyoso, Sayuti Melik, Chairul Saleh dan Moh. Yamin.<sup>14)</sup>

Karena usul balasan ditolak, Pemerintah RI tetap membulatkan tekad mengerahkan tenaga untuk menghadapi segala

kemungkinan. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang diselenggarakan untuk menyempurnakan kesatuan komando.

Pada awal bulan Juni di Solo terjadi pergolakan, dimana rakyat Solo menuntut dilenyapkannya pemerintah kesunanan.

Daerah Istimewa Surakarta dinyatakan menjadi daerah RI yang berbentuk keresidenan. Untuk mencegah segala kemungkinan terjadinya kekacauan di dalam negeri, Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juni 1946 mengesahkan Undang-undang Keadaan Bahaya yang dikenal dengan Undang-undang No. 6 tahun 1946. Sehubungan dengan keadaan di daerah Solo itu, Presiden mengumumkan keadaan bahaya untuk daerah Kesunanan dan Mangkunegaran.

Pergolakan di Solo semakin meluas menjadi pergolakan politik. Pengikut Tan Malaka tetap berusaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri Syahrir dengan cara lain. Sehari kemudian diumumkan keadaan bahaya untuk Jawa dan Madura. Oleh Presiden kemudian dibentuk Dewan Militer yang dipimpin oleh Presiden sendiri berhubungan dengan keadaan bahaya. Juga kesatuan komando Angkatan Perang ditegaskan dimana Panglima Besar Sudirman ditetapkan sebagai Pemimpin Angkatan Darat, Laut dan Udara.

Selanjutnya Presiden pada tanggal 28 Juni 1946 menyatakan Negara (seluruh Indonesia) dalam keadaan bahaya berhubungan dengan adanya peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir dari tempat penginapannya di Solo. Penculikan dilakukan oleh pasukan pengikut Tan Malaka, pada malam tanggal 27/28 Juni 1946. Perdana Menteri Syahrir diculik bersama-sama Mayor Jenderal Subidio. Menteri Kemakmuran, Dr. Darmasetiawan, Dr. Sumitro Joyohadikusumo dan Gaos.

Sehubungan dengan peristiwa itu Presiden Sukarno menyerukan kepada penculik untuk segera mengembalikan Perdana Menteri Syahrir dan kawan-kawannya. Sehari setelah seruan Presiden itu penculik mengembalikan Perdana Menteri Sutan Syahrir dalam keadaan selamat. Ketika terjadi peristiwa penculikan itu, Presiden dengan disetujui oleh kabinet mengambil alih pimpinan Pemerintahan, untuk mengisi kekosongan karena nasib Perdana Menteri belum diketahui.

Lanjutan dari peristiwa penculikan itu, pada tanggal 3 Juli 1946 Mr. Achmad Subarjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri disertai oleh Mayor Jenderal (sekarang Kolonel) Polisi Purnawirawan Sudarsono, Panglima Divisi X – Yogyakarta mencoba memaksa Presiden agar Presiden menanda tangani konsep susunan pimpinan pemerintahan baru.

Yang mereka kehendaki adalah pemimpin pemerintahan agar diserahkan kepada pengikut Tan Malaka. Karena Presiden tidak dapat digertak, maka usaha perebutan kekuasaan itu gagal. Menurut keterangan Pemerintah mereka telah mencoba mempengaruhi dan mencari simpati dari partai-partai politik dan memulai kegiatannya sejak tanggal 31 Oktober 1945.

Sekalipun beberapa hari kemudian Syahrir telah dikembalikan, berhubung dengan kenyataan bahwa Presiden telah mengambil alih pimpinan Pemerintahan Syahrir tidak segera kembali menjabat Perdana Menteri. Karena selama menjadi Perdana Menteri ia merangkap sebagai Menteri Luar Negeri, sesudah ia kembali, Presiden menetapkan Syahrir tetap sebagai Menteri Luar Negeri. Sesudah keadaan normal kembali, pada tanggal 14 Agustus, baru Presiden menunjuk Syahrir kembali sebagai formatur kabinet. <sup>15)</sup>

Sementara itu pihak Belanda melakukan tekanan politik dan militer terhadap Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan konperensi di Malino, dengan

tujuan untuk membentuk "negara-negara" di daerah-daerah yang baru diterima dari Inggris. Negara-negara itu kelak dijadikan imbang terhadap RI, untuk memaksa RI agar menerima bentuk federasi sebagaimana yang diusulkan oleh Pemerintah Belanda. Kecuali *Konperensi Malino* juga diselenggarakan Konperensi di Pangkalpinang khusus untuk golongan minoritas.

Konperensi Malino diadakan pada tanggal 15 – 25 Juli 1946 dan Konperensi Pangkalpinang pada tanggal 1 Oktober 1946. Tekanan militer dilakukan Belanda dengan jalan secara terus-menerus mengirimkan pasukannya ke Indonesia. Pihak Inggris sekali lagi menawarkan jasa baiknya untuk menjadi perantara antara dua negara yang bersengketa ini. Pemerintah Inggris mengutus Lord Killearn untuk menjadi penengah.

Pada bulan Agustus 1946 Lord Killearn datang ke Indonesia dan menemui Menteri Luar Negeri Syahrir. Pokok pembicaraan Syahrir – Killearn ada tiga hal. **Pertama** : masalah gerakan militer dan gencatan senjata. Untuk ini akan dikirim perwira Tentara Republik Indonesia (TKR) yang membahas detail teknis dengan Markas Iesar Serikat di Jakarta. **Kedua** : mengenai masalah RAPWI (*Relief of Allied Prisoners of War and Internees*). Syahrir juga menjanjikan akan mengirimkan perwira TKR yang ditugaskan untuk membahas tersebut. **Ketiga** : Adalah masalah golongan minoritas Indonesia berjanji tetap melindungi golongan minoritas.<sup>16)</sup>

Sebagai realisasi dari pertemuan Syahrir – Killearn pada tanggal 17 September, dikirim delegasi TKR dalam rangka membicarakan gencatan senjata. Delegasi dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudibjo beserta 6 anggota, antara lain T.B. Simatupang. Dalam perundingan dengan Serikat ini delegasi Indonesia mengajukan Nota 5 fasal yang meliputi :

- a. gencatan senjata secara total di darat, laut dan udara.
- b. penghentian pemasukan pasukan Belanda ke Indonesia.
- c. jaminan dari Serikat bahwa Serikat tidak akan menyerahkan senjata-senjatanya kepada pihak Belanda.
- d. pembukaan atau kebebasan memakai jalan di darat, laut dan udara oleh pihak RI.
- e. penyingkiran orang Jepang baik sipil maupun militer dari seluruh Indonesia<sup>17)</sup>.

Nota utusan militer Indonesia ditolak oleh Serikat. Untuk sementara waktu perundingan mengalami kegagalan.

Sementara itu Sutan Syahrir yang ditunjuk menjadi formatur berhasil menyusun kabinetnya. Pada tanggal 2 Oktober 1946 Kabinet Syahrir III dilantik. Kabinet lain melangsungkan perundingan dengan pihak Belanda. Kemudian perundingan gencatan senjata diteruskan. Setelah berunding selama 5 hari (9 - 14 Oktober 1946) akhirnya dicapai persetujuan sebagai berikut :

- 1). Delegasi Indonesia Inggris dan Belanda setuju mengadakan gencatan senjata atas dasar kedudukan militer pada waktu kini dan atas dasar kekuatan militer.
- 2). Disetujui pembentukan Komisi Gencatan Senjata yang bertugas untuk menimbang dan memutuskan pelaksanaan gencatan senjata dan pengaduan terhadap pelanggaran-pelanggaran.
- 3). Komisi ini bekerja sampai 30 Nopember 1946. Susunan Komisi Gencatan Senjata adalah : Mr. Grieg, Mayor Jenderal E.C. Mansergh, Kolonel Laut Cooper, Komodor Udara Srevens, Mayor Jenderal Formann (Inggris) Dr. Sudarsono, Jenderal Soedirman, Laksamana Muda M. Nazif, Komodor (Marsekal Pertama) Suryadarma (Indo-



nesia) dan Dr. Idenburgh, Letnan Jenderal Spoor, Laksamana Pinke, Mayor Jenderal Kengen (Belanda).

- 4). Disetujui bersama membentuk sub-komisi teknis yang terdiri atas para kepala staf militer Inggris, Indonesia dan Belanda. Tugas sub-komisi ini adalah untuk selekasnya memberi perintah penghentian tembak-menembak, menyusun instruksi untuk pedoman pelaksanaan gencatan senjata, membentuk badan arbitrase dan lain-lain.

Pembicaraan masalah gencatan senjata tersebut baru dalam tingkatan politik dan baru tercapai persetujuan prinsip.

Panglima Besar Sudirman dalam pidato radionya menegaskan bahwa dalam masalah gencatan senjata ini belum ada perintah penghentian tembak-menembak, sekalipun telah tercapai persetujuan. Sesuai dengan persetujuan itu pada akhir Nopember dan awal Desember diadakan perundingan-perundingan antara Belanda dan Indonesia untuk menetapkan garis demarkasi. Perundingan itu diakhiri oleh anggota Komisi Gencatan Senjata dari kedua belah pihak, tetapi tidak menghasilkan sesuatu keputusan. Sesudah Kabinet Syahrir dilantik, mulai lagi dilaksanakan perundingan dengan Belanda dan delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Anggota-anggota delegasi tiga orang yaitu : Moh. Room, Mr. Susanto Tirtoprojo dan Ir. A.K. Gani disertai dengan anggota-anggota cadangan Mr. Amir Sjarifuddin, Dr. Sudarsono, dan Dr. J. Leimena. Dasar pokok perundingan adalah program politik pemerintah yang terdiri atas :

- a). berunding atas dasar pengakuan Negara Republik Indonesia merdeka 100%.
- b). Mempersiapkan rakyat dan negara di segala lapangan politik, militer, ekonomi, sosial untuk mempertahankan RI. 18)

Sedang pihak Belanda menyusun Komisi Jenderal yang ditugaskan untuk berunding dengan Indonesia. Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Prof. Schemerhon. Anggota-anggotanya adalah: Max van Poll, F. de Boer dan HJ. Van Mook.

Perundingan dimulai pada tanggal 7 Oktober di Jakarta. Dalam perundingan ini komisi Jenderal mengajukan usul-usul yang tidak dapat diterima oleh pemerintah RI. Usulnya ialah jika pemerintah RI tidak dapat menerima masa peralihan, diusulkan agar RI mau menerima kedudukan sebagai negara bagian. Usul lainnya adalah : Komisi Jenderal menuntut agar RI memulihkan keamanan dan ketertiban sehingga benar-benar RI menguasai keadaan daerah yang dikuasainya. Pihak RI menyatakan bahwa alam pikiran Komisi Jenderal masih diliput oleh rijks eenheidsgedachte (gagasan Kesatuan), kerajaan Belanda), sehingga menuntut RI tetap dalam lingkungan Belanda. Hal inilah yang menjadi sebab untuk sementara perundingan mengalami penundaan. Kemudian pihak RI kembali mengajukan usul mengenai pengembalian hak-hak milik swasta Belanda. Karena tawaran ini dianggap menguntungkan, maka komisi Jenderal menyatakan akan berkonsultasi dengan pemerintahnya.

Akhirnya perundingan diteruskan dan diadakan di Linggarjati pada tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November dan telah tersusun sebagai naskah persetujuan yang terdiri atas 17 fasal. Naskah ini kemudian diparaf oleh kedua belah pihak untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Isi naskah antara lain :

- (1). Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara, berdasarkan federasi, dimana Negara Indonesia Serikat.

2). Pemerintah RIS akan tetap bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk UNI Indonesia Belanda.

Setelah naskah diparaf, timbul pelbagai macam tanggapan dari masyarakat Indonesia, ada yang pro dan kontra naskah persetujuan itu. Mengenai masalah ini, Sutan Syahrir menyatakan harapannya agar naskah persetujuan dapat diterima agar kita dapat mempergunakan tenaga 75 juta rakyat dengan lebih rasionil. Naskah persetujuan bukanlah untuk ditafsirkan, sehingga menimbulkan anggapan seolah-olah merupakan surat wasiat yang menentukan hidup mati dan tidak dapat diubah-ubah. Naskah sekedar alat untuk mencari jalan baru bagi perjuangan kita dimasa mendatang dan sebagai batu loncatan guna mencapai tujuan, yaitu memperbaiki kedudukan politik. Hal ini dapat memberikan harapan kepada rakyat, untuk menunjukkan jalan yang baik, yang baik semata-mata berupa status juridis, tetapi kedudukan politik.

Beberapa partai politik menyatakan menentang diantaranya Masyumi. Masyumi berdasarkan keputusan pengurus Besarnya tanggal 4 Desember 1946 menyatakan menolak naskah persetujuan. Partai-partai lain yang menolak adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita, Angkatan Komunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata; sedangkan yang mendukung adalah PKI, Pesindo, BTI Lasjkar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik. Dewan Pusat Kongres Pemuda menyatakan tidak menentukan sikap terhadap naskah persetujuan. Hal ini karena Pemuda adalah Badan federatif, demi menjaga persatuan di kalangan organisasi mereka.

Golongan yang menolak, bergabung di dalam Benteng Republik Indonesia, yang terdiri dari partai serta organisasi tersebut diatas. Pertentangan pendapat mengenai pro dan

kontra naskah berlangsung terus. Untuk mengambil jalan tengah dalam pertentangan itu pemerintah berusaha untuk segera menyelesaikannya. Pada bulan Desember dikeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946 yang bertujuan untuk menyempurnakan susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Peraturan Presiden No. 6 ini berisi tentang pembebasan para pejabat negara untuk melakukan tugas sebagai anggota KNI, seruan kepada partai-partai politik besar untuk memilih calon-calonnya sejumlah dua kali lipat jumlah hak perwakilan mereka dalam KNIP, serta penambahan wakil-wakil daerah di luar Jawa dan Madura. <sup>19)</sup>

Peraturan Presiden ini juga mendapat tantangan keras dari dua partai politik besar yaitu PNI dan Masyumi. Kedua partai ini berpendapat bahwa Peraturan Presiden tersebut tidak sah, karena setelah ada kabinet, Presiden tidak boleh melakukan tindakan yang *wetgevend*. Juga dalam membuat peraturan itu Badan Pekerja KNIP tidak diajak berunding. Hal ini dianggap pemerkosaan terhadap hak-hak rakyat. Namun partai pemerintah khususnya Partai Sosialis menyatakan bahwa Peraturan Presiden tersebut yang berdasarkan hak proregatif Presiden adalah sah. Sedang Badan Pekerja KNIP juga menentang keras peraturan tersebut.

Di dalam sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat, Presiden menolak tuduhan dari golongan penentang peraturan ini. Dinyatakan bahwa dengan penambahan anggota baru, susunan KNIP menjadi sempurna dan meliputi perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Presiden mempersilakan sidang untuk mempertimbangkan keputusan Badan Pekerja yang menentang Peraturan Presiden tersebut.

Akhirnya sidang menerima Peraturan Presiden tersebut dan pada tanggal 28 Pebruari 1947 dilantik sejumlah 232

anggota baru KNIP. Dengan penambahan suara ini pemerintah berhasil memperoleh dukungan dari KNIP untuk meratifikasi naskah Persetujuan Linggarjati. Akhirnya, pada tanggal 25 Maret 1947 naskah Persetujuan ditandatangani oleh delegasi yang mewakili pemerintah masing-masing.

Sekalipun naskah Persetujuan telah ditanda tangani, hubungan Indonesia – Belanda tidak bertambah baik. Perbedaan tafsir mengenai beberapa fasal persetujuan, menjadi pangkal perselisihan. Apalagi pihak Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata yang telah diumumkan bersama pada tanggal 12 Pebruari 1947, seminggu sebelum naskah ditanda tangani. Pada tanggal 27 Mei 1947 Komisi Jenderal menyampaikan nota kepada pemerintah RI melalui misi Idenburgh. Nota tersebut harus dijawab oleh Pemerintah RI dalam tempo 2 minggu. Isi nota tersebut adalah :

- (a). Membentuk pemerintah peralihan bersama.
- (b). Garis demiliterisasi hendaklah diadakan dan pengacauan-pengacauan di daerah yang bergabung dalam konperensi Malino, seperti; NIT, Kalimantan, Bali dsb harus dihentikan.
- (c). Sehubungan dengan tugas tentara harus diadakan pembicaraan bersama mengenai pertahanan negara. Untuk ini perlu sebagian Angkatan Darat, Laut dan Udara kerajaan Belanda tinggal di Indonesia untuk pembangunan suatu pertahanan yang modern.
- (d). Pekerjaan bersama dalam waktu yang singkat, dapat dijamin dengan pembentukan alat kepolisian yang dapat melindungi kepentingan dalam dan luar negeri.
- (e). Tentang masalah perekonomian : hasil-hasil perkebunan dan devisa diawasi bersama.

Pada tanggal 8 Juni 1947 Pemerintah RI menyampaikan nota balasan yang terdiri empat pokok :

- 1). masalah pemerintahan peralihan/politik.
- 2). masalah militer.
- 3). masalah ekonomi
- 4). dan masalah-masalah lainnya. <sup>20)</sup>

Dalam masalah politik pemerintah menyatakan bersedia mengakui negara Indonesia Timur sekalipun pembentukannya tidak selaras dengan Lingarjati. Status Borneo dibicarakan bersama RI-Belanda tetap diakui sebagaimana termaktub dalam Linggarjati. Dalam bidang militer pemerintah RI menyetujui demiliterisasi daerah demarkasi dengan menyerahkan penjagaan zone bebas militer itu kepada Polisi PETA demarkasi dikembalikan pada situasi 24 Januari 1947. Tentara kedua belah pihak diundurkan dari daerah demarkasi ke Kota Garnizun masing-masing. Mengenai penyelenggaraan fasal 16 tentang Pertahanan Indonesia Serikat, adalah urusan Indonesia Serikat sendiri sebagai kewajiban nasional dan dasarnya harus dilakukan oleh Tentara Nasional sendiri. Gendermarie bersama ditolak.

Meskipun demikian konsesi Syahrir dianggap terlalu jauh, sehingga partainya sendiri melepaskan dukungannya, apalagi partai-partai lain. Akhirnya Kabinet Syahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Sebagai akibat perbedaan pendapat di dalam Partai Sosialis, Syahrir dan kawan-kawannya keluar dan membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Iwa Kusuma Sumantri telah ikut mengalami pahit getirnya perjuangan, ikut ditahan karena terlibat dalam Peristiwa 3 Juli dan baru dibebaskan tanggal 9 Agustus 1948. Setelah bebas Iwa Kusuma Sumantri ikut berjuang bersama para pe-

muda untuk mempertahankan daerah Bogor, Cianjur dan Purwakarta. 21)

Setelah sekutu masuk ke Bandung, maka Iwa Kusuma Sumantri pindah ke Subang dan kemudian ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta Iwa Kusuma Sumantri pindah ke Solo dan akhirnya menetap di Tawangmangu. Sewaktu Jenderal Sudirman beristirahat di Tawangmangu, Iwa Kusuma Sumantri pernah mengunjungi Panglima Besar.

Sewaktu Belanda melancarkan agresi yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dan menduduki kota Yogyakarta, maka Iwa Kusuma Sumantri juga ikut ditangkap bersama Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta serta pemimpin Indonesia lainnya. Setelah Room Royen ditandatangani, maka para pemimpin yang ditahan oleh Belanda dilepaskan kembali, termasuk Iwa Kusuma Sumantri. 22)

Kegiatan Mr. Iwa Kusuma Sumantri selanjutnya adalah ikut berjuang dalam partai politik. Partai politik yang dimasuki "Partai Murba". Partai Murba didirikan pada tanggal 7 Nopember 1948. 23)

Azas dari partai ini adalah :anti fasisme, anti imperialisme dan mendasarkan perjuangan kepada aksi Murba, yang teratur. Tujuan partai adalah mempertahankan dan memperkuat kemerdekaan 100% bagi Republik dan rakyat, sesuai dengan dasar dan tujuan proklamasi 17 Agustus 1945, menuju masyarakat sosialis. 24)

Yang dimaksud dengan istilah Murba adalah golongan rakyat yang terbesar diantara beberapa golongan dalam masyarakat Indonesia dan yang tidak lagi mempunyai apa-apa, kecuali otak dan tenaganya sendiri. Golongan Murba Indonesia adalah golongan yang paling terperas, tertindas diantara semua golongan dalam masyarakat Indonesia. 25)

Partai Murba dipimpin oleh Sukarni dan Maruto Nitiamoharjo. Diantara tokoh Murba yang terkenal adalah Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, Sultami dan Syamsu Harya Udaya. <sup>26)</sup>

Sesudah pengakuan Kedaulatan Mr. Iwa Kusuma Sumantri diangkat sebagai anggota DPR Pusat. Tetapi Iwa Kusuma Sumantri di dalam lembaga ini tidak mewakili Partai Murba, tetapi mewakili Fraksi Progresif. Begitupun ketika diangkat sebagai Menteri Pertahanan tanggal 20 - 7 - 1953 dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo, Iwa Kusuma Sumantri juga mewakili fraksi Progresif. <sup>27)</sup>

Kabinet Ali Sastroamijoyo adalah kabinet parlementer dan merupakan Kabinet yang ke XIII, dengan formatur Mr. Wongsonegoro.

Susuna lengkap kabinet ini adalah :

- a). Perdana Menteri : Mr. Ali Sastroamijoyo – P.N.I.
- b). Wakil PM. I : Mr. Wongsonegoro – P.I.R.
- c). Wakil PM. II : Zainul Arifin – N.U.
- d). Menteri Luar Negeri : Mr. Sunario – P.N.I.
- e). Menteri Dalam Negeri : Prof.Mr. Nazairin – P.I.R.
- f). Menteri Pertahanan : Iwa Kusuma Sumantri – Progresif
- g). Menteri Perekonomian : Mr. Iskaq Cokrohadi-suryo – P.N.I.
- h). Menteri Keuangan : Drs. Ong Eng Die – P.N.I.
- i). Menteri Pertanian : Sajarwo – B.T.I.
- j). Menteri Perburuhan : Prof. Abidin – Partai Buruh
- k). Menteri P.U. : Prof. Ir. Roseno – P.I.R.
- l). Menteri Perhubungan : Abikusno Cokrosuyoso – P.S.I.I.



m). Menteri Kehakiman	: Mr. Jodi Gondokusumo	— P.R.N.
n). Menteri Pengajaran	: Mr. Moh. Yamin	— —
o). Menteri Pengerangan	: Dr F L Tobing	— S.K.I.
p). Menteri Kesehatan	: Dr. Lie Kiat Teng	— P.S.I.I.
q). Menteri Sosial	: RP Suroso	— Parindra
r). Menteri Agraria	: Moh. Hanafiah	— N.U.
s). Menteri Agama	: K.H. Masyhur	— N.U.
t). Menteri Kesejahteraan Negara <sup>28)</sup>	: Sudibyo	— P.S.I.I.

Selama menjadi Menteri Pertahanan, Iwa Kusuma Sumantri telah banyak melakukan untuk kepentingan ABRI. Ia mengusulkan undang-undang pertahanan dan menjadikan daerah Jakarta Raya menjadi daerah Militer tersendiri, terpisah dari Jawa Barat. Iwa Kusuma Sumantri juga memperjuangkan agar asrama ABRI diperhatikan dan juga pensiun bagi janda pahlawan. Pendidikan dikalangan ABRI juga diperhatikan, ia mengusulkan agar perwira ABRI diberi pendidikan di luar negeri. <sup>29)</sup>

Tugas Iwa Kusuma Sumantri sebagai Menteri Pertahanan pada waktu itu cukup berat. Pemberontakan di daerah-daerah seperti pemberontakan DI/DII di Jawa Barat dan Aceh, penyelesaiannya memerlukan suatu kebijaksanaan yang sulit dan sukar dipecahkan dan diselesaikan. Pemerintah harus menghadapi pemberontakan itu dengan segala kemampuan dan tenaga dan dana tersedia. Disamping itu Iwa Kusuma Sumantri juga tidak menyetujui sikap pemerintah yang Jakarta centris pada waktu itu.

Setelah kabinet Ali Sastroamojoyo menyerahkan mandatnya pada tahun 1955, Iwa Kusuma Sumantri tidak lagi aktif dalam bidang pemerintahan dan politik. Baru setelah Presiden Sukarno membentuk Dewan Nasional Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi anggota Dewan Nasional. <sup>30)</sup>

Tahun 1958 Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi Presiden (Rektor) Universitas Pajajaran di Bandung. Tahun 1961 Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi Menteri "Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan" (PTIP). Tahun 1962 Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi Menteri Negara. <sup>31)</sup>

Mulai tahun 1966 Iwa Kusuma Sumantri pensiun dari semua jabatan pemerintah. Beliau aktif kembali mengarang, dan sampai saat terakhir dapat mengarang sebanyak 9 buah buku. Tanggal 27 Nopember 1971 Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH meninggal dunia di Paviliun Cendrawasih R.S.C.M. Jakarta. <sup>32)</sup>

## CATATAN

1. Nugroho Notosusanto (editor) *Sejarah Nasional Indonesia VI* Balai Pustaka Jakarta 1977, hal. 29.
2. *Ibid*, hal 29
3. *Almanak Umum Nasional 1955*, Endang Jakarta 1955 hal 49.
4. Iwa Kusuma Sumantri, *Sejarah Revolusi Indonesia jilid II* Grafika Jakarta hal 66.
5. Adam Malik, *Riwayat Dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia* Jakarta 1962, hal 66.
6. *Ibid*, hal 71
7. Nugroho Notosusanto (editor) *opcit*, hal 35
8. Osman Raliby, *Sejarah Hari Pahlawan*, Jakarta 1952, hal 25.
9. Nugroho Notosusanto (Editor) *opcit*, hal 32
10. *Ibid*, hal 33
11. *Ibid*, hal 34
12. *Ibid*, hal 35
13. Susanto Tirtoprojo, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta 1963 hal 19
14. Nugroho Notosusanto (Editor) *opcit*, hal 38
15. *Ibid*, hal 40
16. *Ibid*, hal 41
17. *Ibid*, hal 41
18. *Ibid*, hal 42
19. *Ibid*, hal 44
20. *Ibid*, hal 46
21. Iwa Kusuma Sumantri, *opcit*, hal 22
22. *Ibid*, hal 202

23. Kementerian Penerangan, *Kepartaian di Indonesia* Jakarta 1951, hal 319
24. *Ibid*, hal 319
25. *Ibid*, hal 318
26. *Ibid*, hal 326
27. Almanak Umum Nasional 1955, *opcit*, hal 61
28. *Ibid*, hal 61 - 62
29. Majalah Selecta, *Prof. H.Iwa Kusuma Sumantri SH (1899-1971)* Jakarta 1971 hal 42.
30. *Ibid*, hal 42
31. *Ibid*, hal 42
32. *Ibid*, hal 2

## P E N U T U P

Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH adalah seorang pemimpin Indonesia, tokoh pergerakan nasional Indonesia yang mempunyai andil yang besar dalam perjuangan kemerdekaan. Ia telah mengabdikan dirinya untuk perjuangan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan.

Iwa Kusuma Sumantri termasuk kedalam kelompok pemimpin pendiri Republik Indonesia, angkatan Sukarno – Hatta. Kalau Sukarno – Hatta di masukkan dalam lapisan pertama dalam kepemimpinan, maka Iwa Kusuma Sumantri termasuk dalam lapisan kedua, seperti Achmad Subarjo Sunaryo dan para pemimpin pergerakan seangkatan mereka.

Dalam hal pahit-getirnya hidup, kepemimpinan Iwa Kusuma Sumantri termasuk punya andil yang besar, seperti halnya Sukarno – Hatta dan Syahrir yang pernah dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda, maka Iwa Kusuma Sumantri pun pernah mengalami pembuangan itu selama 11 tahun.

Pada masa awal kemerdekaan ia ditunjuk menjadi Menteri Sosial Kabinet I. Sesudah Pengakuan Kedaulatan Iwa Kusuma Sumantri, diangkat menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Parlementer di bawah Ali Sastroamijoyo. Jabatan Menteri Pertahanan termasuk jabatan kunci dalam suatu kabinet disamping Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Sebagai seorang sarjana dan cendekiawan yang mempunyai reputasi tinggi, Iwa Kusuma Sumantri juga pernah diangkat menjadi Presiden (Rektor) Universitas Pajajaran di Bandung. Kemudian oleh Presiden Sukarno ia diangkat menjadi menteri Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Kedua jabatan itu menggambarkan betapa tingginya pandangan pemerintah terhadap kadar dan bobot ilmu yang dikuasai oleh Iwa Kusuma Sumantri.

Sebagai tokoh pergerakan Iwa Kusuma Sumantri pernah menjadi Ketua Indonesische Vereeniging yang kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri Belanda. Ia pernah menjadi anggota PNI dan kemudian sesudah Indonesia merdeka masuk menjadi anggota Partai Murba. Iwa Kusuma Sumantri juga pernah menjadi anggota DPR dan anggota Dewan Nasional.

Secara garis besarnya dapatlah dikatakan bahwa Iwa Kusuma Sumantri adalah tokoh politik dan tokoh cendekia-  
wan yang menonjol. Ia adalah pemimpin dan ia adalah "bintang" dalam sejarah Nasional Indonesia.

---

## DAFTAR BACAAN

1. Achmad Subarjo Yayoadisuryo Prof. SH, *Peranan Ide-Ide Dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*, Idayu Jakarta 1975
2. A.K. Pringgodigdo SH, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat Jakarta 1960.
3. Ali Sastroamijoyo SH, *Tonggok Tonggok di Perjalananku*, Pt Kita Jakarta 1874
4. AH Nasution, Jenderal Dr, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia III*. Angkasa Bandung 1977.
5. *Almanak Umum Nasional 1955*, Endang Jakarta 1955.
6. *Harian KAMI 29-12-1971*, Iwa Kusuma Sumantri wafat Jakarta 1971.
7. Iwa Kusuma Sumantri Prof SH, *Sejarah Revolusi Indonesia II*, Grafika Jakarta.
8. Yusman Basri Drs (Editor) *Sejarah Nasional Indonesia V*, Balai Pustaka Jakarta 1977.
9. Kementrian Penerangan RI, *Kepartaian Di Indonesia*, Jakarta 1951.
10. *Majalah Selecta* Prof. H. Iwa Kusuma Sumantri SH ( 1899 – 1971 ) Jakarta 1971.
11. Mardans Safwan Drs. *Peranan Gedung Kramat Raya 106 Dalam Melahirkan Sumpah Pemuda*, DMS DKI, Jakarta 1973.
12. Mardans Safwan Drs, *Peranan Gedung Menteng Raya 31 Dalam Perjuangan Kemerdekaan*, IMS, DKI Jakarta 1970.
13. Moh. Hatta, *Momoir*, Tintamas Jakarta 1978.
14. Moh. Hatta, *Peranan Pemuda Menuju Indonesia Merdeka Indonesia Adil Makmur* Angkasa Bandung 1966.
15. Nugroho Notosusanto Prof. Dr. (Editor) *Sejarah Nasional Indonesia VI* Balai Pustaka Jakarta 1977.

16. Sy Ruger Ir. (terjemahan Supeno) *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* Hayam Wuruk Subarjo 1961.

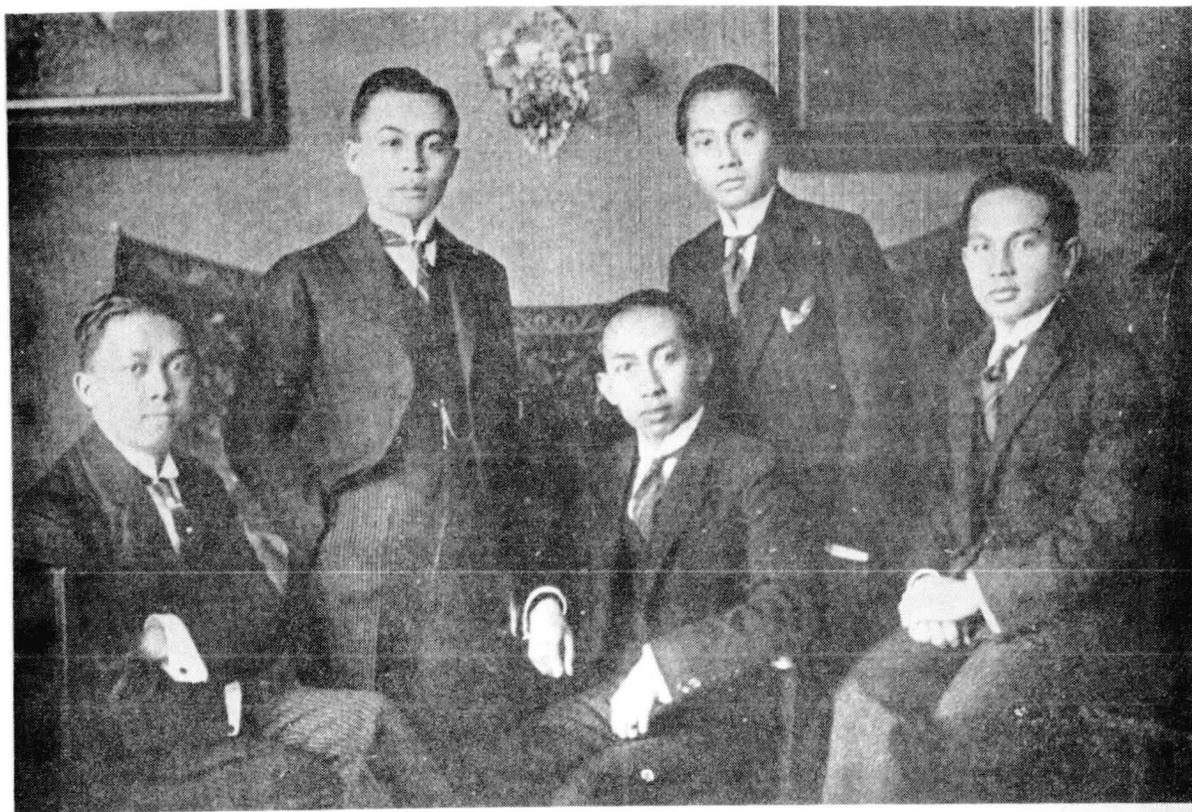




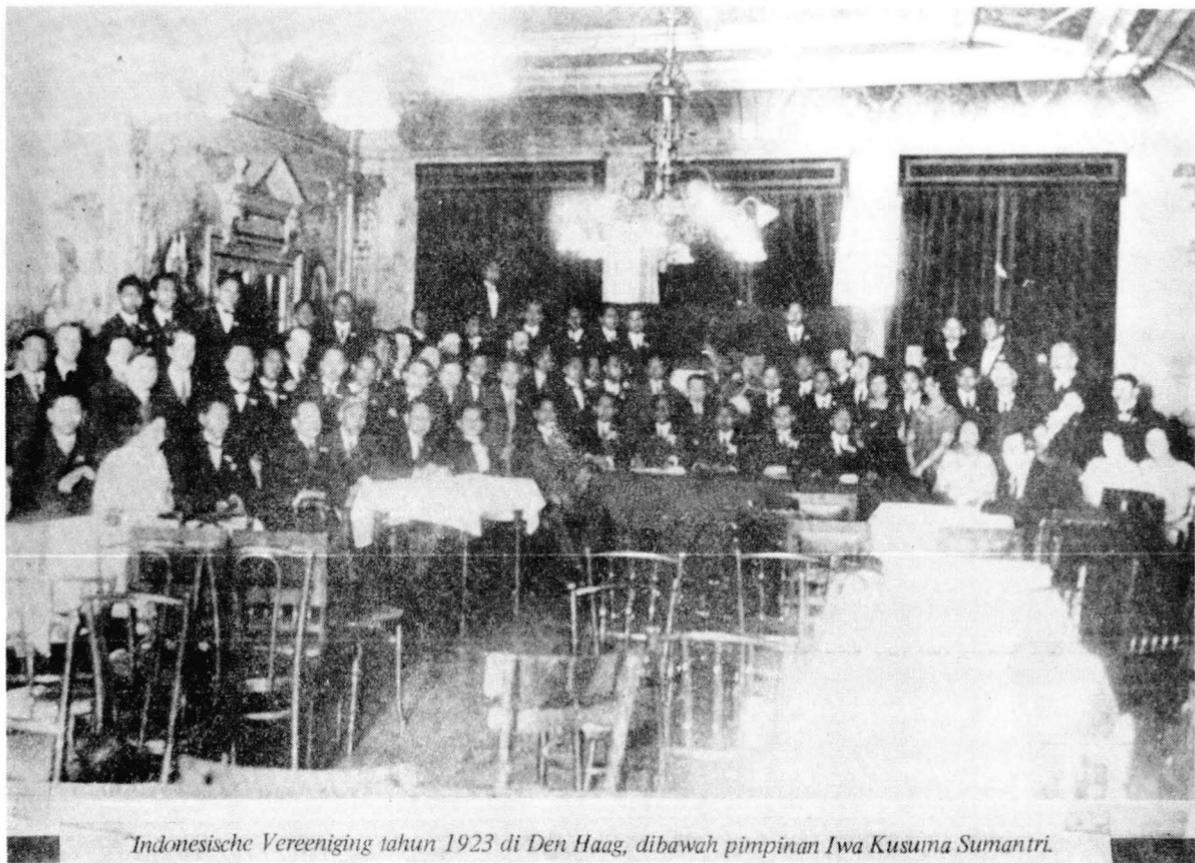
Mr. Iwa Kusuma Sumantri.



*Gambar bersama Kabinet Mr. Ali Sastroamidjojo Wongsinegoro bersama Pres. Soekarno, tanggal 12 Agustus 1953 di Istana Merdeka Jakarta.*



*Indonesische Vereeniging, tahun 1923 di Nederland. Gambar dari kiri ke kanan Goenawan Mangoenkoesoemo, Moh. Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Sastromoeliono dan Sartono.*



*Indonesische Vereeniging tahun 1923 di Den Haag, dibawah pimpinan Iwa Kusuma Sumantri.*

Perpustakaan  
Jenderal

9